



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) TAHUN 2023

Dinas PPPAPPKB
Kabupaten Temanggung



Jalan Jendral Sudirman Nomor 130 dan 132 Temanggung
Kode Pos 56218 Telepon/Faximili (0293) 491059
email : dpppappkb@temanggungkab.go.id

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah Nya, sehingga tugas penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Kabupaten Temanggung Tahun 2023 dapat kami selesaikan. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana (DPPPAPPKB) Kabupaten Temanggung disusun sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan laporan ini merupakan upaya kami untuk menginformasikan pertanggungjawaban kinerja yang telah dilakukan selama tahun 2023, sebagai konsistensi kami terhadap komitmen untuk menciptakan transparansi yang merupakan pilar terwujudnya tata pemerintahan yang baik. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana (DPPPAPPKB) Tahun 2023 memuat informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan kebijakan program dan kegiatan, serta pencapaian sasaran dalam mewujudkan tujuan, misi dan visi Pemerintah Kabupaten Temanggung yaitu:

“TERWUJUDNYA MASYARAKAT TEMANGGUNG YANG TENTREM, MAREM, GANDEM”

Secara keseluruhan penyelenggaraan Pemerintah di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana (DPPPAPPKB) Kabupaten Temanggung telah tercapai sesuai dengan target yang direncanakan. Namun juga disadari masih terdapat satu indikator kinerja yang belum tercapai. Dengan adanya laporan ini dapat digunakan sebagai sarana evaluasi agar kinerja ke depan menjadi lebih baik, produktif, efektif dan efisien,

baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya.

Hasil pencapaian kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana (DPPPAPPKB) Kabupaten Temanggung tidak terlepas dari kerjasama dan kerja keras semua pihak dalam perumusan kebijakan, maupun dalam implementasi serta pengawasannya.

Akhir kata, kami sampaikan terima kasih yang telah memberikan dukungan, bantuan serta partisipasi dalam penyusunan LKjIP Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana (DPPPAPPKB) Kabupaten Temanggung Tahun 2023.

Temanggung, Februari 2024
KEPALA DPPPAPPKB
KABUPATEN TEMANGGUNG



Dra. GEMA ARTISTI WAHYUDI, M.M.

Pembina TK I

NIP. 19700730 199001 2 002

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi.....	iii
Daftar Tabel	iv
Daftar Gambar	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Gambaran Umum Dinas PPPAPPKB.....	1
B. Dasar Hukum, Tujuan dan Manfaat LKJIP	14
C. Sistematika Penyajian LKJIP.....	15
BAB II PERENCANAAN KINERJA	17
A. Rencana Strategis	17
B. Indikator Kinerja Utama	23
C. Cascading PD.....	24
D. Rencana Anggaran/Anggaran Tahun 2023	30
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	34
A. Capaian Kinerja Organisasi	70
B. Akuntabilitas Keuangan	71
C. Prestasi dan Penghargaan.....	79
BAB IV PENUTUP.....	80

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Data Personil dan Tata laksana	10
Tabel 1.2. Aset dan Modal Penunjang Kinerja	11
Tabel 1.3. Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas	12
Tabel 2.1. Telaah Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah	20
Tabel 2.2. Sasaran dan Indikator Kinerja Utama (IKU)	23
Tabel 2.3. Rencana Anggaran Tahun 2022	29
Tabel 3.1. Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Temanggung	35
Tabel 3.2. Capaian Indikator Kinerja Utama Sasaran Strategis 1	36
Tabel 3.3. Indeks Pembangunan Gender	38
Tabel 3.4. Persentase Perempuan dan Anak Korban Kekerasan	39
Tabel 3.5. Capaian Indikator Kinerja Utama Sasaran Strategis 2	40
Tabel 3.6. Indikator IPG	41
Tabel 3.7. Capaian Kinerja Sasaran.....	43
Tabel 3.8. Skala Pengukuran Kinerja Laporan Kinerja Instansi Pemerintah	45
Tabel 3.9. Capaian Indikator Kinerja Sasaran Program I	46
Tabel 3.10. Persentase Keterwakilan di Lembaga Pemerintahan.....	47
Tabel 3.11. Rasio PD yang menerapkan kebijakan Responsif Gender	48
Tabel 3.12. Capaian Indikator Kinerja Sasaran Program	50
Tabel 3.13. Jumlah Korban Kekerasan Perempuan dan Anak	51
Tabel 3.14. Capaian Indikator Kinerja Sasaran Program 3	54
Tabel 3.15. Persentase Desa Sayang Ibu dan Bayi.....	55
Tabel 3.16. Capaian Indikator Kinerja Sasaran Program 4	57
Tabel 3.17. Capaian Indikator Kinerja Sasaran Program 5	59
Tabel 3.18. Capaian Indikator Kinerja Sasaran Program 6	59
Tabel 3.19. Unmetneed	68
Tabel 3.20. Persentase Pasangan Usia Subur yang istrinya dibawah 20 Th.....	69
Tabel 3.21. Capaian Indikator Kinerja Sasaran Program 7	64
Tabel 3.22. Persentase Peserta KB Aktif	67
Tabel 3.23. Persentase Penggunaan Alat Kontrasepsi MKJP	68
Tabel 3.24. Capaian Indikator Kinerja Sasaran Program 8	70
Tabel 3.25. Program Penunjang Urusan Perangkat Daerah	72
Tabel 3.26. Pencapaian Kinerja Program	74
Tabel 3.27. Realisasi Anggaran Tahun 2022.....	76
Tabel 3.28. Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2022	83
Tabel 3.29. Kinerja Efisiensi Anggaran per Sasaran Strategis	84

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1. Penghargaan Kota Layak Anak	86
Gambar 3.2. Penghargaan Kegiatan pelayanan KB dalam rangka TMKK	86
Gambar 3.3. Penghargaan Pelayanan Ramah Anak	

BAB I PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM PERANGKAT DAERAH

1. Latar Belakang

Menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik. Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana (DPPPAPPKB), yang pada tahun 2021 sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung no 56 tahun 2020, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Kabupaten Temanggung, dan Perpub no 20 tahun 2021 tentang tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana DPPPAPPKB.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana (DPPPAPPKB) Kabupaten Temanggung selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi DPPPAPPKB sebagai sub sistem dari sistem Pemerintahan Daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam pelaksanaan program urusan Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak, dan program urusan pengendalian penduduk keluarga Berencana di Kabupaten

Temanggung, capaian tujuan dan sasaran program dan kegiatan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, tetapi mensinergikan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup pemerintahan Kabupaten, Propinsi dan Nasional. Sehubungan dengan hal tersebut DPPAPPKB Kabupaten Temanggung diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Penyusunan LKjIP DPPKBPPPA Kabupaten Temanggung Tahun 2023 yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

2. Tugas Pokok dan Fungsi

Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana DPPAPPKB Kabupaten Temanggung, yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan dan Tatakerja Organisasi Perangkat Daerah. Dan Perpub no 20 tahun 2022 tentang Tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana (DPPAPPKB).

a. Dasar Hukum Berdirinya Organisasi

Dasar Hukum berdirinya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana DPPAPPKB Kabupaten Temanggung adalah Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor : 110 Tahun 2021, tentang Kedudukan Susunan dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah dan Kabupaten Temanggung.

b. Tugas Pokok dan Fungsi organisasi

Tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana DPPAPPKB Kabupaten Temanggung adalah sesuai dengan Peraturan Bupati Kabupaten Temanggung Nomor: 20 Tahun 2022 mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan Pemerintah Daerah dalam Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Bidang Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, DPPAPPKB Kabupaten Temanggung mempunyai fungsi:

- a. Perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk, dan keluarga berencana;
- b. Pelaksanaan penyusunan kebijakan teknis dan strategis dan keterpaduan dibidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk, dan keluarga berencana;
- c. pengoordinasian pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi dilingkungan Dinas;
- d. pelaksanaan penyuluhan dan dan penyebaran informasi dibidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk, dan keluarga berencana;
- e. pelaksanaan monitoring dan evaluasi di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk, dan keluarga berencana;
- f. pembinaan teknis fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah dibidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk, dan keluarga berencana;
- g. pengarahan, pembinaan dan pengoordinasian pelaksanaan fungsi kesekretariatan dinas; dan pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan fungsinya

2.1.1 Uraian Tugas dan Fungsi Perangkat daerah

Uraian tugas dan fungsi Kepala DPPAPPKB, Sekretaris, Kepala Bidang, Sub bagian dengan seksi sebagaimana Struktur Organisasi di atas adalah sebagai berikut :

2.1.1.1 Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Dinas

Kepala Dinas PPPAPPKB mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada

Daerah. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Dinas mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan pemberdayaan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- b. Perumusan kebijakan pemberdayaan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- c. Pelaksanaan kebijakan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- d. Pelaksanaan kebijakan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- e. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- f. Pelaksanaan, pembinaan administrasi dan kesekretariatan kepada seluruh unit kerja di lingkungan Dinas; dan
- g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan fungsinya.

2.1.1.2 Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat

Sekretariat merupakan unsur pembantu pimpinan, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi pelaksanaan seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas. Dalam melaksanakan tugas, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan koordinasi kegiatan di lingkungan Dinas;
- b. Penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana program dan kegiatan di lingkungan Dinas;
- c. Penyiapan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi bidang ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat dan kearsipan di lingkungan Dinas;
- d. Penyiapan koordinasi, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Dinas;
- e. Penyiapan koordinasi pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah dan pengelolaan sistem informasi dan dokumentasi;
- f. Penyiapan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Dinas;
- g. Penyiapan evaluasi dan pelaporan di lingkungan Dinas; dan

- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Sekretaris dibantu 2 sub bagian, yaitu:

1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; dan
2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

2.1.1.3 Tugas pokok dan Fungsi Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi penyusunan perencanaan program dan kegiatan, pengelolaan keuangan, evaluasi dan pelaporan di lingkungan Dinas.

Tugas Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan meliputi:

- a. Menyiapkan bahan rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran pada Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
- b. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan;
- c. Menyiapkan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan dan keuangan;
- d. Menyiapkan bahan dan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis di bidang keuangan;
- e. Menyiapkan bahan dan koordinasi penyusunan perencanaan program dan kegiatan di lingkungan Dinas;
- f. Menyiapkan bahan dan koordinasi pengendalian program dan kegiatan di lingkungan Dinas;
- g. Menyiapkan bahan pengelolaan data dan informasi di bidang perencanaan;
- h. Menyiapkan bahan penyusunan Perjanjian Kinerja;
- i. Menyiapkan bahan pengelolaan keuangan;
- j. Menyiapkan bahan pelaksanaan verifikasi dan pembukuan;
- k. Menyiapkan bahan pengelolaan data dan informasi di bidang keuangan;
- l. Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan dan keuangan; dan
- m. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.1.2.4 Tugas pokok dan Fungsi Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang umum dan kepegawaian.

Tugas dari Sub bagian Umum dan Kepegawaian :

- a. Menyiapkan bahan rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang umum dan kepegawaian;
- c. Menyiapkan bahan dan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis di bidang umum dan kepegawaian;
- d. Menyiapkan bahan pengelolaan ketatausahaan di lingkungan Dinas;
- e. Menyiapkan bahan pengelolaan kepegawaian di lingkungan Dinas;
- f. Menyiapkan bahan pengelolaan rumah tangga dan aset di lingkungan Dinas;
- g. Menyiapkan bahan kerjasama dan kehumasan di lingkungan Dinas;
- h. Menyiapkan bahan pengelolaan kearsipan dan dokumentasi di lingkungan Dinas;
- i. Menyiapkan bahan pelaksanaan organisasi, hukum dan ketatalaksanaan di lingkungan Dinas;
- j. Menyiapkan bahan penyusunan Standar Operasional Prosedur, Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, Evaluasi Jabatan, Budaya Kerja, Standar Pelayanan, Zona Integritas serta pengusulan formasi kebutuhan pegawai Dinas;
- k. Menyiapkan bahan dan pengoordinasian pelaksanaan/fasilitasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, Survei Kepuasan Masyarakat;
- l. Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang umum dan kepegawaian; dan
- m. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.1.2.5 Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak

Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak merupakan unsur pelaksana di pemberdayaan perempuan dan

perlindungan anak, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang pengarusutamaan gender, perlindungan perempuan dan anak serta peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak.

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melaksanakan fungsi:

- a. Penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan koordinasi dan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pengarusutamaan gender, perlindungan perempuan dan peningkatan kualitas hidup perempuan;
- b. Penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan koordinasi dan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang perlindungan anak dan peningkatan kualitas hidup anak;
- c. Penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan koordinasi dan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak; dan
- d. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Susunan Organisasi Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, terdiri atas Jabatan Fungsional dan Pelaksana yang dikoordinir oleh Sub Koordinator. Sub Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:

- a. Sub Koordinator Pengarusutamaan Gender dan Perlindungan Perempuan; dan
- b. Sub Koordinator Perlindungan dan Peningkatan Kualitas Hidup Anak.

2.1.2.6. Bidang Pengendalian Penduduk dan Peningkatan Keluarga Sejahtera

Bidang Pengendalian Penduduk dan Peningkatan Keluarga Sejahtera merupakan unsur pelaksana di bidang pengendalian penduduk dan peningkatan keluarga sejahtera, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

Bidang Pengendalian Penduduk dan Peningkatan Keluarga Sejahtera dipimpin oleh Kepala Bidang, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pengendalian penduduk dan peningkatan keluarga sejahtera.

Dalam melaksanakan Bidang Pengendalian Penduduk dan Peningkatan Keluarga Sejahtera melaksanakan fungsi:

- a. Penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan koordinasi dan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pengendalian penduduk;
- b. Penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan koordinasi dan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera; dan
- c. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Susunan Organisasi Bidang Pengendalian Penduduk dan Peningkatan Keluarga Sejahtera, terdiri atas Jabatan Fungsional dan Pelaksana yang dikoordinir oleh Sub Koordinator.

Sub Koordinator meliputi :

- a. Sub Koordinator Perencanaan dan Sinkronisasi Kebijakan Pengendalian Penduduk; dan
- b. Sub Koordinator Ketahanan Keluarga dan Keluarga Sejahtera.

2.1.2.7. Bidang Pengelolaan Pelayanan dan Pembinaan KB

Bidang Pengelolaan Pelayanan dan Pembinaan KB merupakan unsur pelaksana di bidang pengelolaan pelayanan dan pembinaan KB, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris dan dipimpin oleh Kepala Bidang.

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Pengelolaan Pelayanan dan Pembinaan KB melaksanakan fungsi :

- a. Penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria pelayanan KB, pemenuhan kebutuhan, penyimpanan, pengendalian dan pendistribusian alat dan obat kontrasepsi serta penggerakan, pembinaan, peningkatan kesertaan ber-KB;
- b. Penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang advokasi, komunikasi informasi dan edukasi program kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga;
- c. Penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pendayagunaan tenaga penyuluh KB; dan

- d. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Susunan Organisasi Bidang Pengelolaan Pelayanan dan Pembinaan KB sebagaimana, terdiri atas Jabatan Fungsional dan Pelaksana yang dikoordinasikan oleh Sub Koordinator.

Sub Koordinator, sesuai struktur organisasi yaitu:

- a. Sub Koordinator Pelayanan Keluarga Berencana; dan
- b. Sub Koordinator Advokasi dan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga.

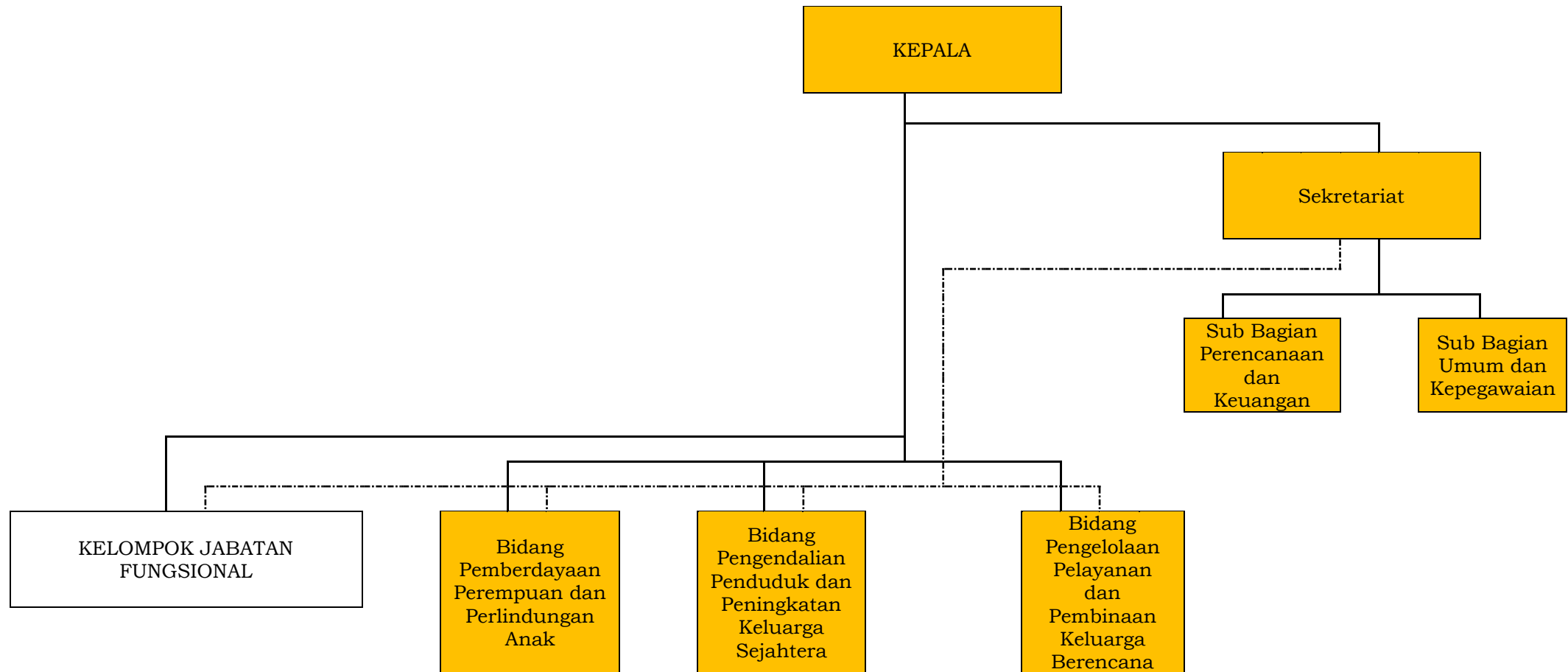
2.1.2.8 Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas untuk melakukan kegiatan sesuai dengan Jabatan Fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang undangan.

- Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam kelompok sesuai dengan bidang keahliannya;
- Pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional dikoordinasikan oleh ketua kelompok Jabatan Fungsional sesuai dengan rumpun jabatan masing-masing;
- Penilaian prestasi kerja Jabatan Fungsional dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Susunan Organisasi

Gambar 1.1
Struktur Organisasi DPPPAPKB Kabupaten Temanggung
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN TEMANGGUNG



2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

2.2.1 Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia atau biasa disingkat menjadi SDM adalah potensi yang terkandung dalam diri manusia untuk mewujudkan perannya sebagai makhluk sosial yang adaptif dan transformatif yang mampu mengelola dirinya sendiri serta seluruh potensi yang terkandung didalamnya menuju insan yang religius, nyaman, dan sejahtera.

Tabel 1.1
Data Personil dan Tata laksana Dinas PPPAPPKB

NAMA JABATAN (SESUAI PERDA***)	KUALIFIKASI PENDIDIKAN (TERAKHIR*)									GOLONGAN/PANGKAT*)				PENDIDIKAN PELATIHAN STRUKTURAL*)			
	SD	SMP	SLTA	D1	D2	D3	S1	S2	S3	I	II	III	IV	PIM I	PIM II	PIM III	PIM IV
Eselon 1																	
Eselon 2																	
KEPALA PERANGKAT DAERAH								1					1		-1		
Eselon 3																	
SEKRETARIS									1				1			1	
KABID PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK									1				1			-	
KABID PENGENDALIAN PENDUDUK DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA									1				1			-	
KABID PENGELOLAAN PELAYANAN DAN PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA								1					1			1	
Eselon IV																	
KASUBBAG PERENCANAAN DAN KEUANGAN								1					1				1
KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN									1				1				1
JABATAN FUNGSIONAL						2	4	1			2	4	2				
PELAKSANA	1	1	5			4	6			2	5	8					
JUMLAH	1	1	5			6	11	6		2	7	13	8			2	2
TOTAL	28									28				4			

2.2.2 Asset/Modal

Guna melaksanakan tugas dan fungsi DPPPAPPKB tidak cukup mengandalkan dari jumlah dan kualitas sumber daya manusia saja. Pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut juga menuntut adanya ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai, sehingga tercapai kualitas kinerja yang baik. Secara umum sarana dan prasarana digunakan untuk menunjang kegiatan ketatausahaan atau administrasi perkantoran, pembinaan dan pelayanan administrasi kepegawaian, upaya peningkatan kualitas kinerja sumber daya manusia/aparatur sipil negara serta penunjang pelaksanaan program dan kegiatan DPPPAPPKB.

Secara sederhana gambaran sarana dan prasarana kerja DPPPAPPKB dapat dilihat pada table 1.2 berikut ini:

Tabel 1.2
Aset dan Modal Penunjang Kinerja DPPPAPPKB

No	URAIAN	Jumlah Aset	Nilai Aset	Keterangan
1	Tanah	3 Bidang	272.850.000	Eks BKKBN, Eks DINSOS, Gudang Arsip.
2	Gedung	39 Gedung	8.352.676.652	Eks BKKBN, Eks DINSOS, Gudang Arsip, 20 Balai Penyuluhan, Selasar 1, Tempat Ibadah 1, Pagar Permanen 8.
3	Alat – Alat Angkutan	86 Unit	3.348.234.311	Sepeda Motor 80, Mobil 8
4	Alat – Alat Perkantoran	1785 Buah	1.971.222.087	

4. Isu Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana.

4.1 Isu Strategis

Menyikapi permasalahan pembangunan daerah yang berkembang pada saat ini dan dikaitkan capaian Visi dan Misi Kabupaten Temanggung, maka faktor pelayanan Perangkat Daerah yang berperan dalam pencapaian tersebut salah satunya karena adanya permasalahan yang dihadapi DPPPAPPKB. Kami berusaha menyikapi beberapa isu terkait Urusan Bidang Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak serta Urusan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Adapun permasalahan tersebut antara lain sebagaimana yang terdapat pada Tabel 1.3 sebagai berikut:

Tabel 1.3
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1.	Penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	Belum optimalnya jejaring lembaga pengelola keberdayaan perempuan dan anak	-Terbatasnya serta belum optimalnya lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan dan anak, - Keterbatasan dan kemampuan pendamping dan petugas dan belum terbentuknya UPT PPPA
2	Masih rendahnya Penyusunan Anggaran Responsif Gender	Belum Tersedianya data pilah sebagai dasar penyusunan Anggaran Reponsif Gender	Masih kurangnya Koordinasi Pokja PUG dalam review dan evaluasi Penyusunan Anggaran Reponsif Gender
2	Tingginya keluarga beresiko stunting	- Tingginya angka perkawinan dibawah 20 tahun - Masih rendahnya pengetahuan Keluarga tentang pentingnya 1000 HPK	- Rendahnya keluarga mengikuti kelompok kegiatan (BKB, BKR, PIK-R, BKL, UPPKA) - Masih lemahnya Kolaborasi untuk konvergensi penanganan penurunan Stunting antar lintas program dan sektor
3	Tingginya angka dropout akseptor	Rendahnya capaian KB Paska Persalinan	Tingginya pasangan usia subur yang ingin ber-KB tidak terpenuhi/ unmetneed

4	Persentase keberhasilan pemakaian metode kontrasepsi jangka panjang	<ul style="list-style-type: none"> - Masih rendahnya pengetahuan PUS , tentang alokon MKJP - Masih rendahnya komitmen pelaksanaan pelayanan KB MKJP 	<ul style="list-style-type: none"> . Tidak semua masyarakat dengan keyakinan tertentu menerima jenis alat kontrasepsi MKJP - Masih adanya bidan yang mempromosikan alat kontrasepsi Suntik dibandingkan dengan MKJP Masih adanya PUS yang trauma menggunakan alat kontrasepsi MKJP , karena efek dari Rumor penggunaannya
---	---	---	--

Berdasarkan pemetaan permasalahan sebagaimana tabel 1.3 tersebut maka isu strategis DPPPAPPKB adalah sebagai berikut:

1. Masih tingginya angka perkawinan usia anak;
2. Masih lemahnya keterlibatan lintas sektoral dalam mendukung program KKBPK, Pemberdayaan dan perlindungan anak;
3. Masih rendahnya penghasilan perempuan sebagai salah satu indikator IPG (Indeks Pembangunan Gender);
4. Kemampuan dan keterbasan petugas dalam pendampingan Kasus KDRT
5. Masih tingginya PUS dibawah umur 20 Tahun;
6. Masih tinggi PUS yang ingin berKB tidak terpenuhi (Unmetneed);
7. Rendahnya keluarga mengikuti kelompok kegiatan (BKB, BKR, PIK-R, BKL, UPPKA);
8. Rendahnya capaian KB Paska Persalinan;
9. Presentase penggunaan alat kontrasepsi MKJP masih rendah;
10. Rasio jumlah PKB dilapangan dibandingkan dengan jumlah desa yang ada belum memenuhi standar yang diharapkan, karena saat ini jumlah PKB dengan jumlah desa yang ada 1 PKB membina 7 sampai 10 desa, harapannya adalah 1 PKB 2 sampai 3 desa.

B. Dasar Hukum, Tujuan dan Manfaat LKJIP

I. Dasar Hukum

Dasar Hukum penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) secara umum mendasari:

1. Peraturan presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja instansi Pemerintah;
4. Peraturan Daerah Kabupten Temanggung Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupten Temanggung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023;
5. Peraturan Bupati Nomor 100 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan bupati nomor 86 Tahun 2019 tentang indikator kinerja utama Pemerintah Kabupaten Temanggung dan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung;
6. Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2022 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung.

II. Tujuan LKjIP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) DPPPAPPKB Kabupaten Temanggung disusun dengan tujuan untuk mempertanggungjawabkan kinerja dalam mencapai tujuan/sasaran strategis sesuai dengan tugas pokok dan fungsi DPPPAPPKB sebagai unsur penyelenggara pemerintahan, serta sebagai penerima mandat kewenangan pengelolaan sumberdaya dan kebijakan yang dipercayakan oleh masyarakat kepada Pemerintah Daerah secara periodik, sehingga dapat terwujud suatu pemerintahan yang baik (*Good Governance*).

III. Manfaat LKjIP

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

- a. Sebagai bahan evaluasi kinerja bagi pihak yang membutuhkan;

- b. Mendorong instansi Pemerintah dalam proses penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan datang;
- c. Sebagai acuan penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang;
- d. Laporan Akuntabilitas Keuangan Juga dapat dimanfaatkan sebagai pertimbangan penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan.

C. SISTEMATIKA PENYAJIAN LKJIP

Penyusunan LKjIP Kabupaten Temanggung Tahun 2023 disusun dengan sistematika yang mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan.

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi berupa kondisi geografis, sumberdaya manusia Perangkat Daerah, Kedudukan dan Fungsi Struktur Organisasi, Instrumen Pendukung Pengelolaan Kinerja serta isu strategis Perangkat Daerah.

BAB II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan ringkasan / ikhtisar perjanjian kinerja tahun 2023

BAB III Akuntabilitas Kinerja.

Pada bab ini disajikan capaian kinerja untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis sesuai dengan hasil pengukuran kinerja. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja. Selain itu juga diuraikan realisasi anggaran yang telah digunakan sesuai kinerja organisasi dokumen Perjanjian Kinerja.

BAB IV PENUTUP

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana DPPPAPPKB ini secara garis besar berisi informasi mengenai rencana kinerja maupun capaian kinerja selama Tahun 2023 yang berfungsi sebagai media/wahana pertanggungjawaban kepada publik atas penyelenggaran Pemerintahan. Untuk itu Penyusunan Laporan Kinerja DPPPAPPKB Kabupaten Temanggung Tahun 2023 mengacu pada peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Untuk mewujudkan Temanggung yang Tentrem, Marem dan Gandem untuk jangka menengah periode tahun 2018-2023 Visi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana (DPPKBPPPA) Kabupaten Temanggung adalah:

“TERWUJUDNYA TEMANGGUNG YANG TENTREM MAREM GANDEM”

Visi Pembangunan Daerah Kabupaten Temanggung periode RPJMD Tahun 2018–2023 adalah “Terwujudnya Masyarakat Temanggung yang Tentrem, Marem, Gandem”

Penjabaran dari Visi tersebut antara lain adalah :

- Tentrem** : Terwujudnya kehidupan masyarakat yang aman, damai, rukun, penuh kegotongroyongan, hidup berdampingan tanpa memandang perbedaan suku, agama, ras, golongan dan status sosial, serta saling menghormati antar masyarakat
- Marem** : Terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat secara lahir dan batin, adil dan merata
- Gandem** : Masyarakat memiliki kemampuan berfikir, beraktualisasi, inovatif dan kreatif, mandiri, serta berprestasi sehingga menjadi masyarakat yang hebat

Dengan penjabaran sebagai berikut :

Daerah agraris berwawasan lingkungan merupakan sebuah kondisi daerah yang ingin diwujudkan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, yaitu suatu kondisi daerah yang secara ekonomi bertumpu pada sektor pertanian sebagai penggerak utama perekonomian daerah dan tumpuan kehidupan masyarakat. Sebagai sektor penggerak perekonomian daerah maka pengembangan sektor pertanian tetap dengan memperhatikan peningkatan kualitas lingkungan hidup.

1. Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, berkarakter, dan berdaya

Manusia yang berkualitas adalah manusia yang komprehensif dalam berfikir dan selalu mengantisipasi tuntutan di masa depan, memiliki sikap positif, berperilaku terpuji, dan berwawasan, serta memiliki kemampuan, keterampilan, dan keahlian yang sesuai dengan kebutuhan di berbagai bidang pembangunan. Manusia berkarakter adalah manusia yang memiliki kepribadian dan budi pekerti yang luhur serta menjunjung tinggi nilai-nilai kehidupan bermasyarakat seperti toleransi dan kegotongroyongan. Manusia berdaya adalah manusia yang mengerti, termotivasi, tahu berbagai alternatif, memanfaatkan peluang, berenergi, mampu bekerjasama, mampu mengambil keputusan, berani mengambil resiko, mampu mencari dan menangkap informasi, serta mampu bertindak sesuai dengan situasi.

2. Mewujudkan pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang berbasis potensi unggulan daerah dan berkelanjutan

Pemberdayaan ekonomi kerakyatan merupakan upaya memberdayakan kelompok ekonomi yang mendominasi struktur dunia usaha yang di kelola oleh dan untuk kelompok masyarakat. Potensi daerah adalah segala sesuatu yang dimiliki oleh suatu daerah baik yang berbentuk fisik atau non fisik yang memiliki peluang untuk di kembangkan oleh Pemerintah Daerah. Dalam hal ini berupa sektor/komoditas di Kabupaten Temanggung. Sektor unggulan adalah sektor yang pertumbuhannya cepat dan mampu bersaing dengan sektor yang sama pada wilayah regional, dan mampu menggerakkan sektor lainnya. Kabupaten Temanggung memiliki berbagai potensi unggulan daerah baik di bidang pertanian, perkebunan, industri dan pariwisata. Penguatan ekonomi yang berbasis potensi unggulan dengan berpihak kepada rakyat kecil diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sehingga akan memutus rantai kemiskinan melalui peningkatan ekonomi masyarakat. Pembangunan ekonomi

kerakyatan yang berbasis potensi unggulan daerah didukung dengan pengembangan infrastruktur daerah yang memperhatikan rencana tata ruang, dan berwawasan lingkungan.

3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas;

Tata kelola pemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang bersih, berwibawa, bisa bergerak secara sinergis, responsif, dan mendapat dukungan dari rakyat. Tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) diperlukan dalam menyelenggarakan fungsi Pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan publik (*public service*), pelaksana pembangunan (*development*) dan pemberdayaan masyarakat (*empowering*).

Untuk mencapai Visi tersebut, Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBPPPA) harus melakukan upaya-upaya yang jelas atau Misi yang jelas yang terumuskan sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan teknis dibidang Keluarga Berencana Keluarga Sejahtera Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
2. Pembinaan umum dan teknis dibidang Keluarga Berencana Keluarga Sejahtera Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
3. Pembinaan terhadap lembaga-lembaga perangkat daerah dibidang Keluarga Berencana Keluarga Sejahtera Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
4. Penyelenggaraan pelayanan umum daerah dibidang Keluarga Berencana, Keluarga Sejahtera Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
5. Penyelenggaraan penyusunan data dan informasi daerah dibidang Keluarga Berencana Keluarga Sejahtera Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
6. Monitoring Evaluasi dan Pelaporan terhadap pelaksanaan tugas-tugas daerah dibidang Keluarga Berencana Keluarga Sejahtera Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
7. Penyelenggaraan kesekretariatan daerah Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan.

Untuk kelancaran pelaksanaan Misi perlu disusun kebijakan dan strategi. Kebijakan dan Strategi merupakan langkah dan tindakan yang akan dilakukan dalam rangka mendukung pelaksanaan Misi yang telah ditetapkan. Keterkaitan antara Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan, dan Strategi yang

ditetapkan DPPPAPPKB Kabupaten Temanggung dapat dilihat pada tabel 2.1 berikut:

Tabel.2.1
Telaah Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah

Visi/Misi/Program Kerja KDH	Tupoksi	Permasalahan	Faktor Penghambat dan Pendorong
“Terwujudnya Masyarakat Temanggung Yang Tentrem, Marem, Gandem”			
<p>MISI 1</p> <p>1) Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, berkarakter, dan berdaya;</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Penyusunan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana. • Pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana. • Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana. 	<ul style="list-style-type: none"> • Belum optimalnya jejaring lembaga pengelola pemberdayaan perempuan dan anak • Belum Tersedianya data pilah sebagai dasar penyusunan Anggaran Reponsif Gender • - Tingginya angka perkawinan dibawah 20 tahun • - Masih rendahnya pengetahuan Keluarga tentang pentingnya 1000 HPK • Rendahnya capaian KB Paska Persalinan - • Masih rendahnya Jumlah PUS yang menggunakan 	<p>Faktor Penghambat :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Masih lemahnya RR di lini lapangan • Belum optimalnya peran institusi masyarakat pedesaan dalam peningkatan program KKBPK • Masih lemahnya kemampuan dan keterbatasan pendamping dalam penanganan dan pencegahan • Masih adanya rumor dan faktor trauma pemakaian kontrasepsi MKJP pada masyarakat • Masih adanya masyarakat golongan tertentu yang masih menolak pemakaian kontrasepsi tertentu <p>Faktor Pendorong :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan kapasitas Kader IMP dalam peningkatan KKBPK • Peningkatan jejaring dan lintas sektoral dalam pencegahan dan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Visi/Misi/Program Kerja KDH	Tupoksi	Permasalahan	Faktor Penghambat dan Pendorong
		alat kontraspasi MKJP	

Berdasarkan analisa terhadap Visi Misi Bupati dan Wakil Bupati Temanggung Tahun 2018-2023 maka dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor dalam pelayanan DPPAPPKB, adapun faktor faktor meliputi:

Faktor-faktor pendorong

Yaitu faktor yang dapat meningkatkan kinerja pelayanan DPPAPPKB dalam upaya mendukung kinerja program pembangunan untuk pencapaian visi dan misi pembangunan Kabupaten Temanggung antara lain :

1. Peningkatan kapasitas Kader IMP dalam peningkatan KKBPK dan peningkatan pengetahuan untuk KIE kepada masyarakat;
2. Inovasi Perangkat Daerah yaitu SIMANTAP KON KB, yaitu sistem Manajemen Pelaporan Kontrasespsi KB, sebagai dasar kegiatan pelayanan KB;
3. Peningkatan jejaring dan lintas sektoral dalam pencegahan dan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak;
4. Telah disosialisasikan inovasi DPPAPPKB, dalam menjaring permasalahan laporan kekerasan terhadap perempuan dan Anak yaitu SIPESAN PERAK.

Faktor-faktor penghambat

Yaitu kinerja pelayanan DPPPAPPKB dalam mendukung kinerja program pembangunan untuk pencapaian visi dan misi pembangunan Jawa Tengah antara lain:

1. Masih lemahnya kemampuan dan keterbatasan pendamping dalam penanganan dan pencegahan;
2. Belum optimalnya peran institusi masyarakat pedesaan dalam peningkatan program KKBPK;
3. Masih lemahnya RR di lini lapangan;
4. Masih rendahnya prosentase KB Pasca Persalinan, sebesar 35,32;
5. Masih tingginya Persentase pasangan usia subur yang ingin ber-KB tidak terpenuhi/unmetneed, sebesar 11,47;
6. Masih ada masyarakat tertentu yang belum menerima penggunaan alat kontrasepsi tertentu.

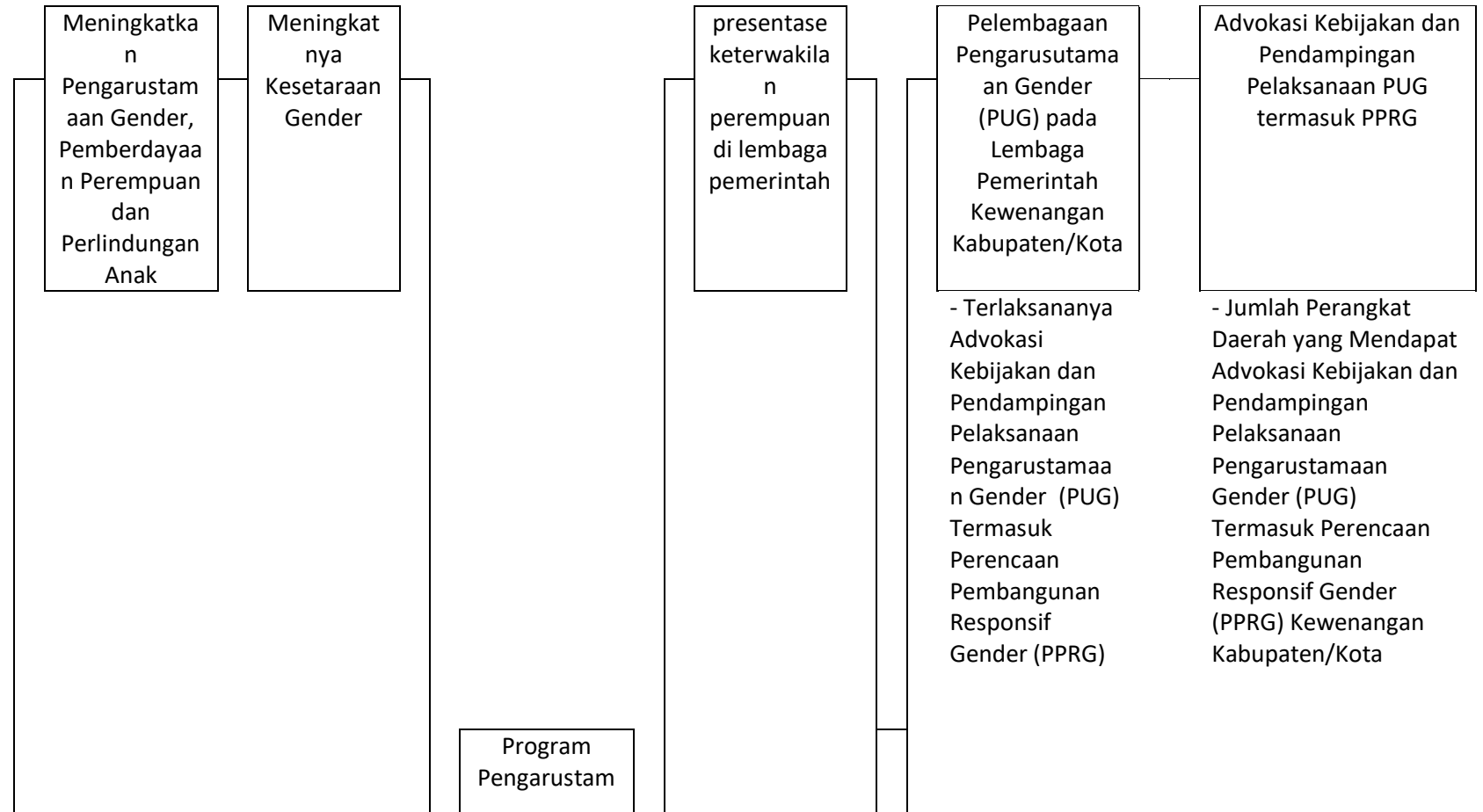
B. Indikator Kinerja Utama

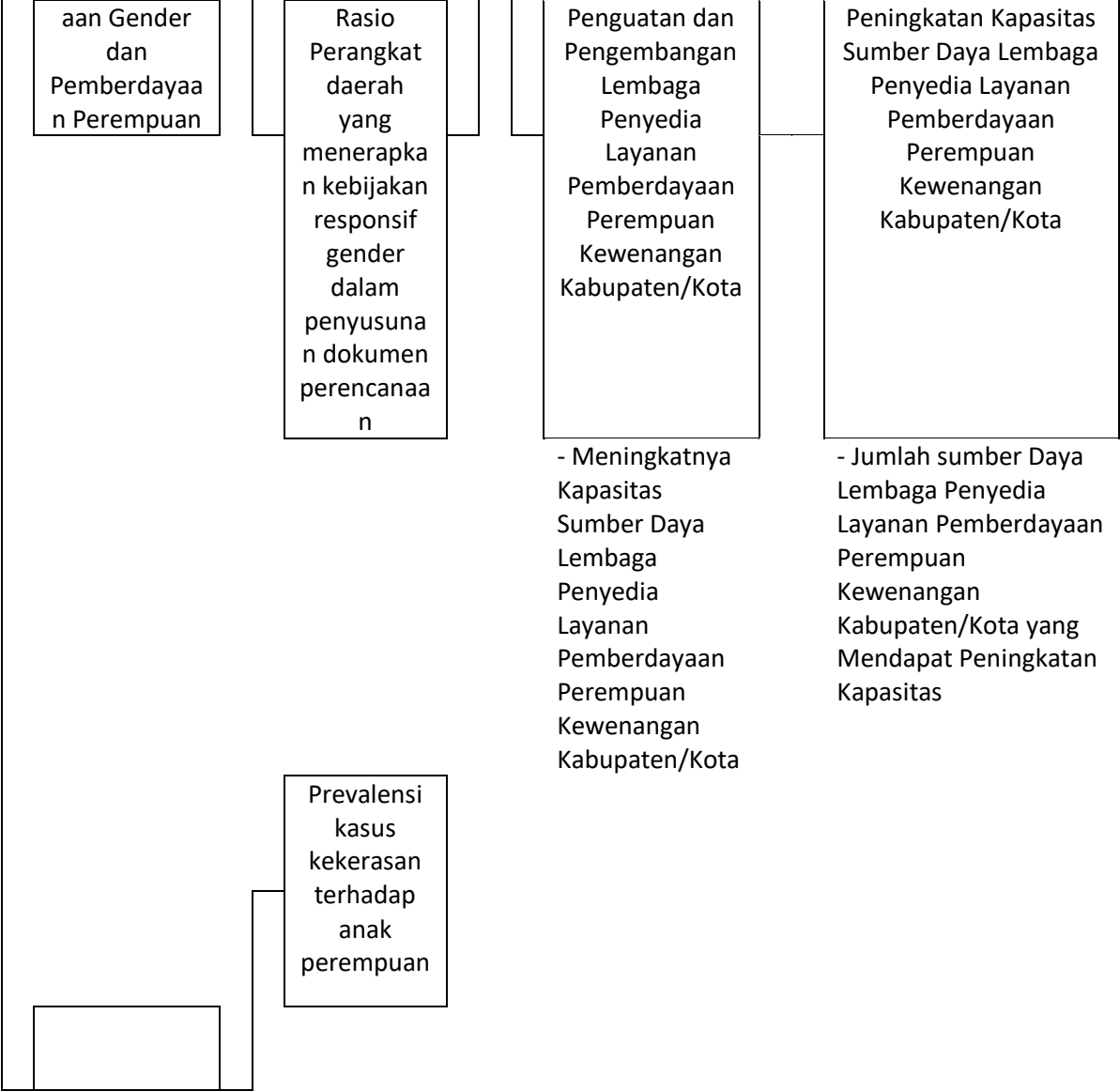
Indikator Kinerja Utama DPPKBPPPA Kabupaten Temanggung ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 100 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 86 tahun 2019 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Temanggung dan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung sebagaimana tercantum dalam tabel 2.2 sebagai berikut:

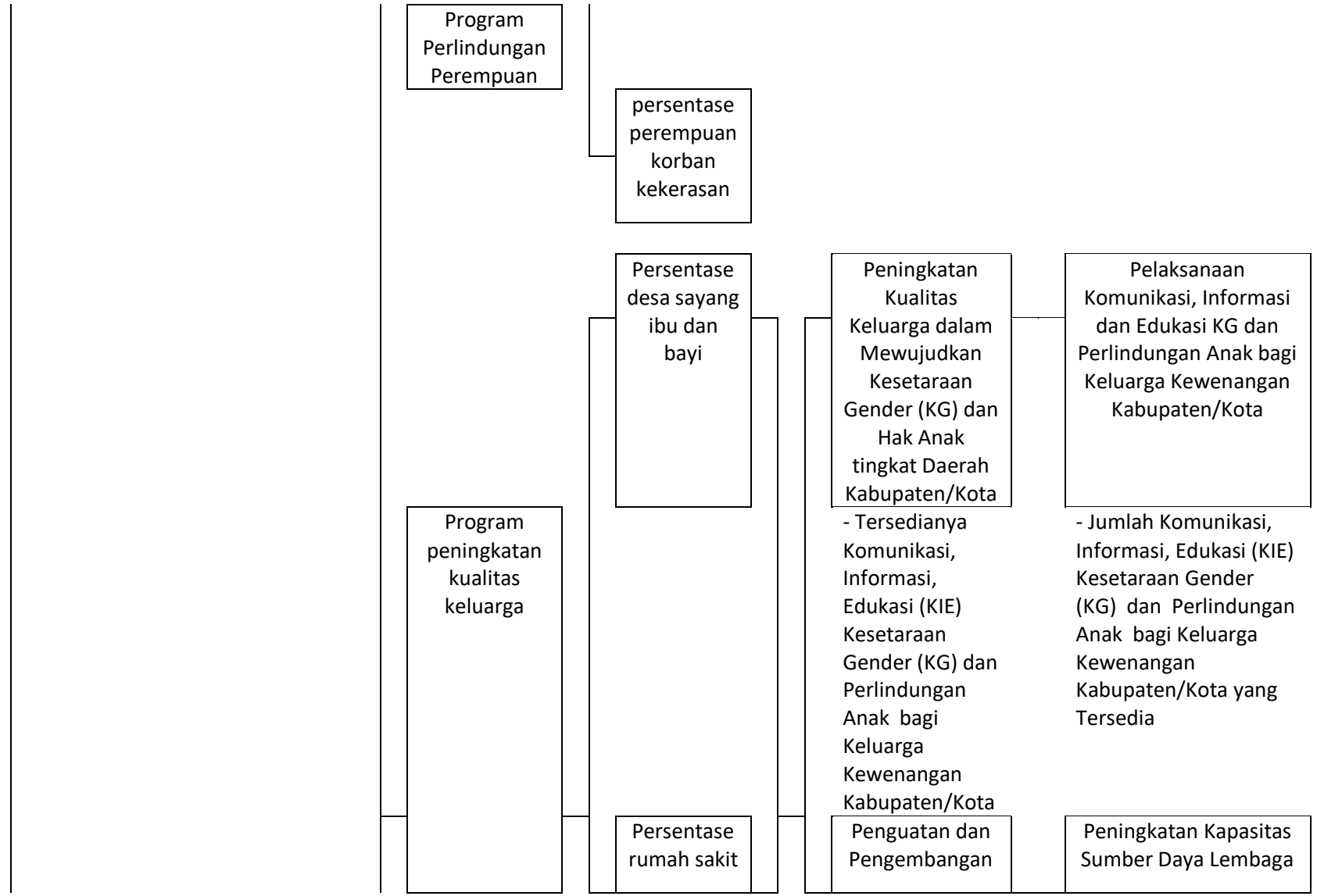
Tabel 2.2
Sasaran dan Indikator Kinerja Utama (IKU)

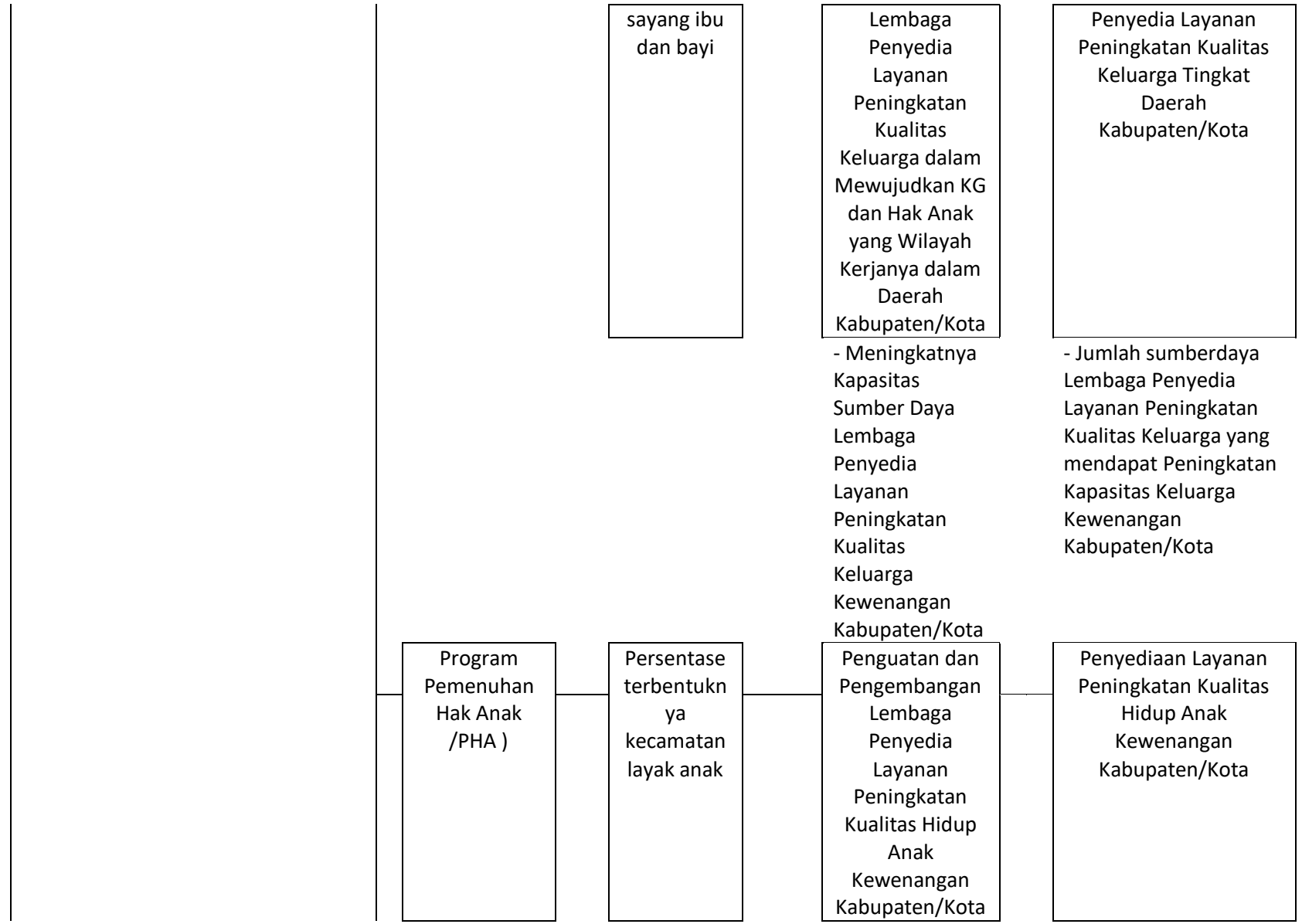
Misi 1 : Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, berkarakter, dan berdaya			
NO	SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA UTAMA
1	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		
-	Meningkatnya Indeks Pembangunan Gender		Indeks Pembangunan Gender (IPG)
-	Menurunnya Jumlah kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak		Persentase Perempuan dan anak korban kekerasan
2	PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA		
-	Menurunnya Laju Pertumbuhan Penduduk		Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)

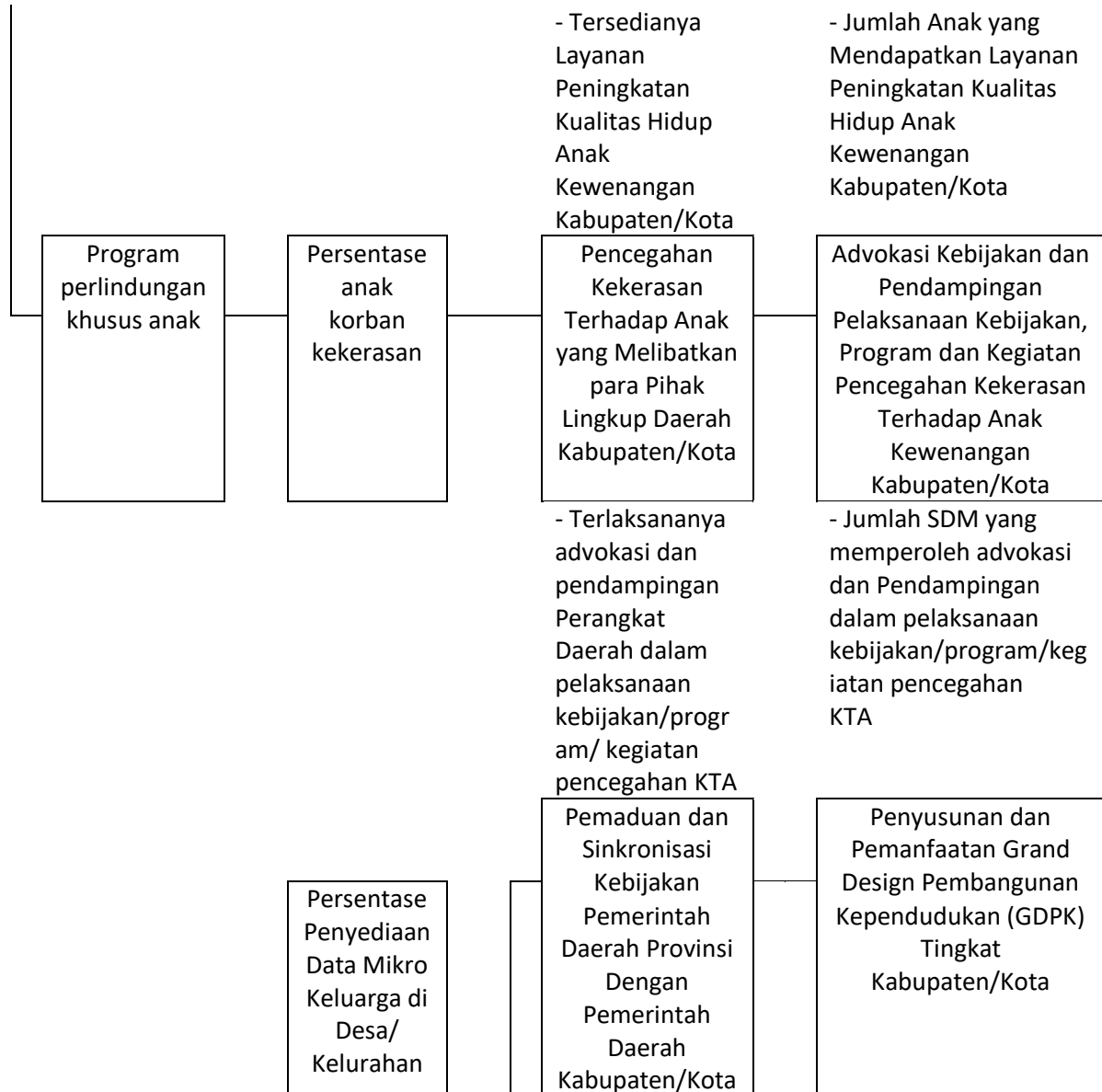
C. Cascading DPPAPPKB

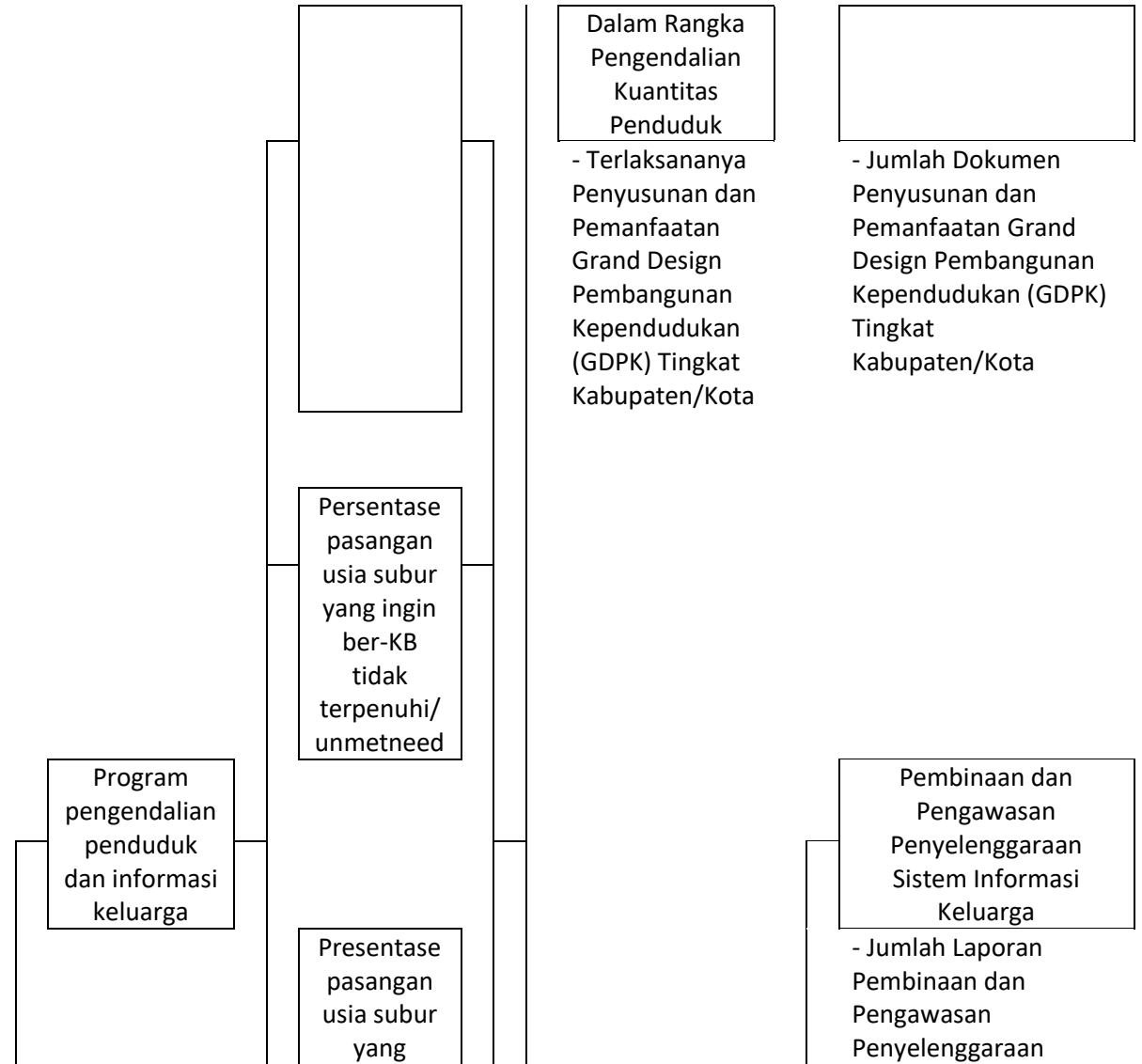


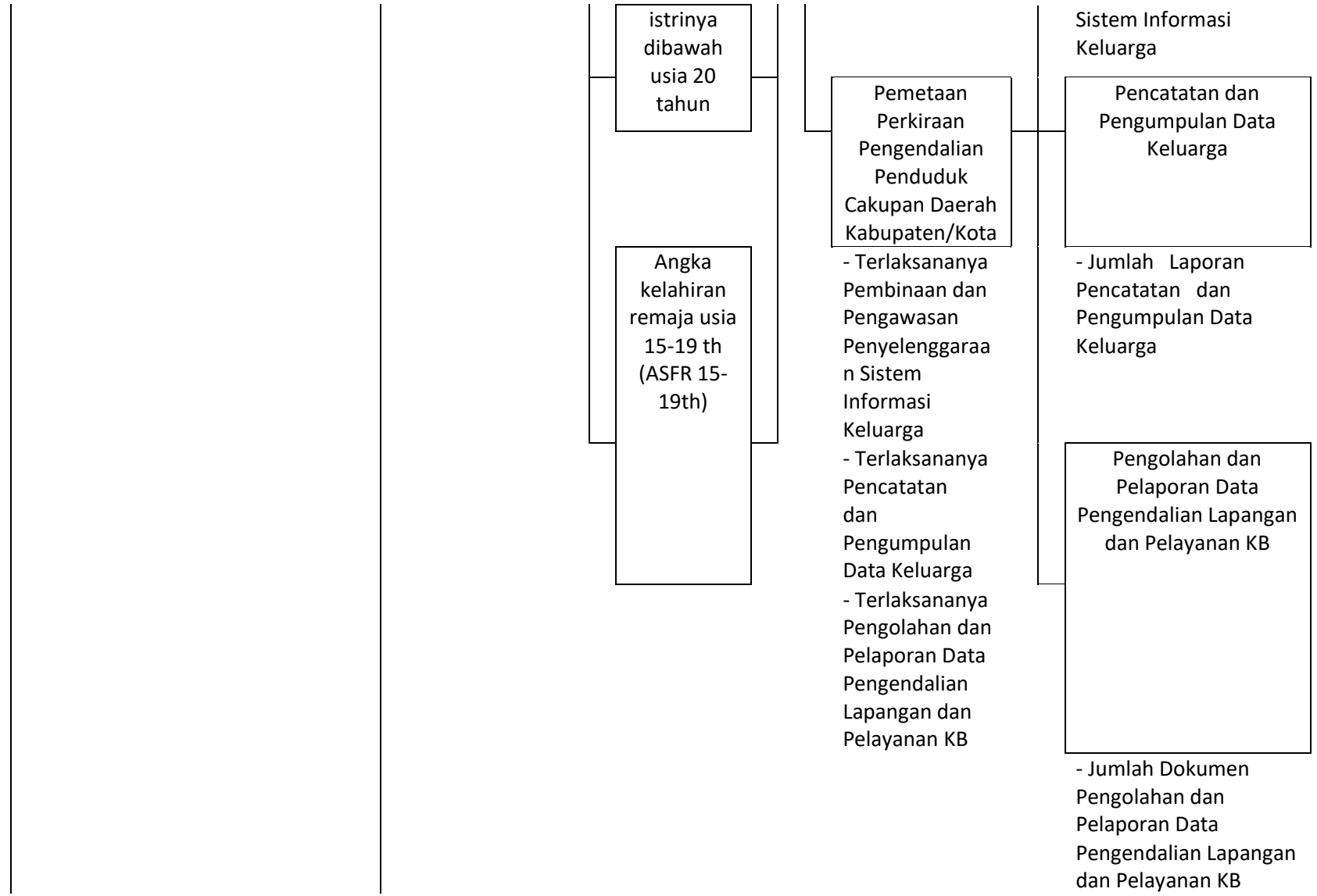












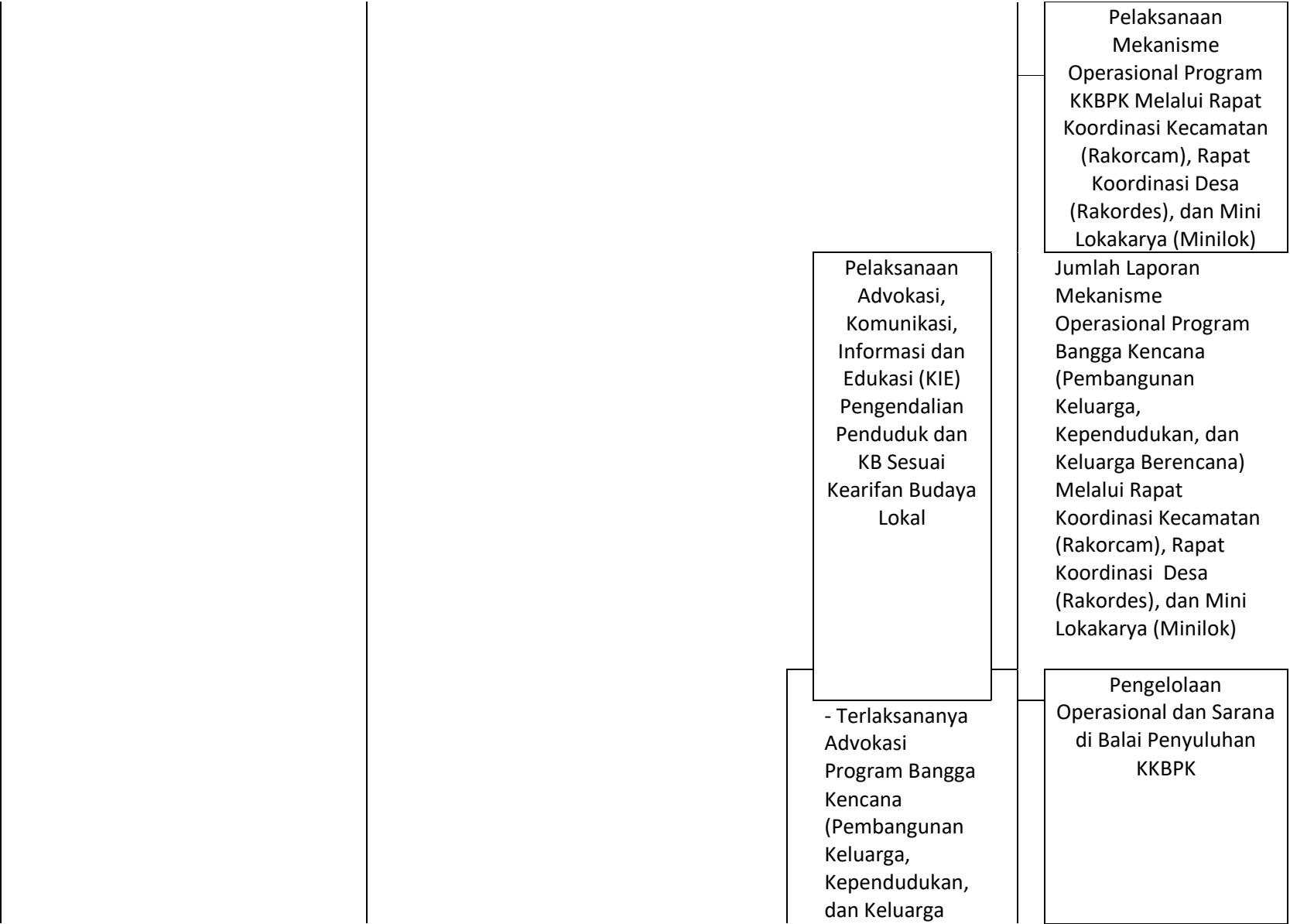
--	--

Advokasi Program
KKBPK kepada
Stakeholders dan Mitra
Kerja

- Jumlah Organisasi
yang Mendapatkan
Advokasi Program
Bangga Kencana
(Pembangunan
Keluarga,
Kependudukan, dan
Keluarga
Berencana) kepada
Stakeholders dan Mitra
Kerja

Promosi dan KIE
Program KKBPK Melalui
Media Massa Cetak dan
Elektronik serta Media
Luar Ruang

- Jumlah Dokumen
Promosi dan KIE
Program Bangga
Kencana
(Pembangunan
Keluarga,
Kependudukan, dan
Keluarga Berencana)
Melalui Media Massa
Cetak dan Elektronik
serta Media Luar Ruang



		<p>Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja</p> <ul style="list-style-type: none"> - Terlaksananya Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang - Terlaksananya Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan 	<div data-bbox="2083 168 2394 362" style="border: 1px solid black; height: 119px; width: 125px;"></div> <p>- Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)</p> <div data-bbox="2083 865 2394 1328" style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>Pengendalian Program KKBPK</p> </div>
--	--	---	---

(Rakorcam),
Rapat
Koordinasi Desa
(Rakordes), dan
Mini Lokakarya
(Minilok)

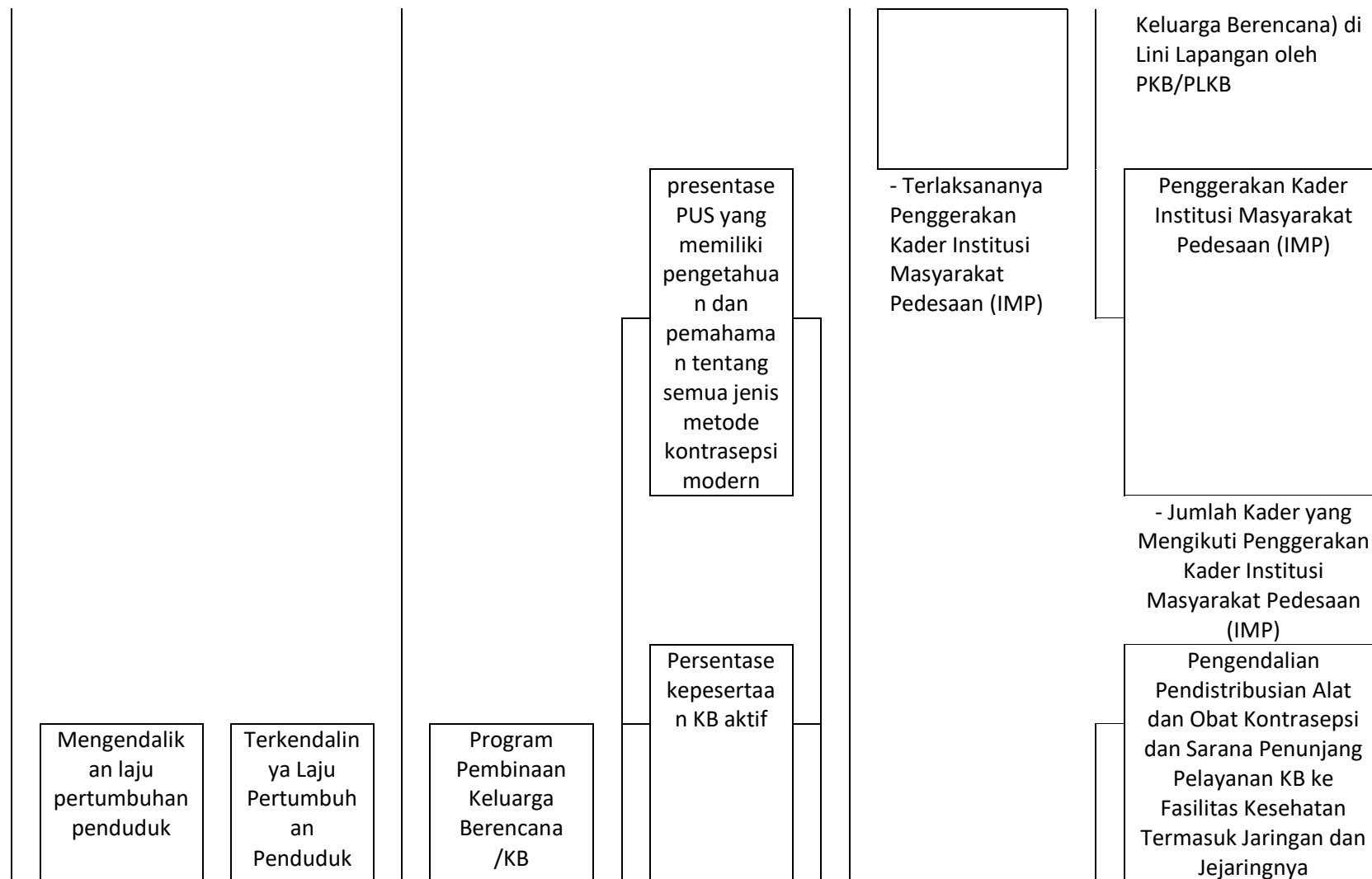
- Terkelolanya Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)
- Terlaksananya Pengendalian Program KKBPK

Pendayagunaan
Tenaga
Penyuluh
KB/Petugas
Lapangan KB
(PKB/PLKB)

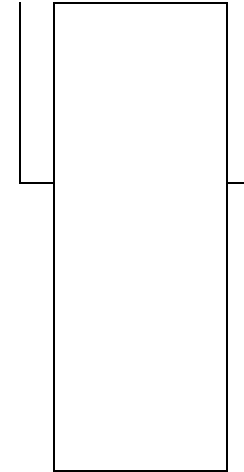
Jumlah Laporan Hasil
Pengendalian Program
KKBPK

Pembinaan IMP dan
Program KKBPK di Lini
Lapangan oleh
PKB/PLKB

- Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan



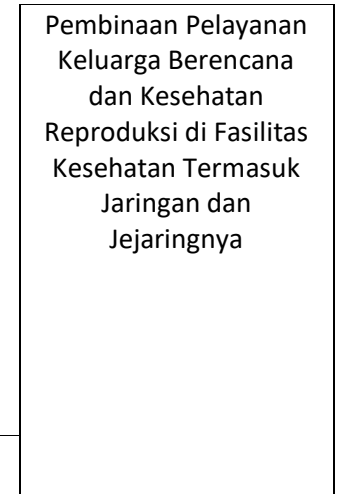
			<p>Persentase keberhasilan pemakaian metode kontrasepsi jangka panjang</p>	<p>Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi Serta Pelaksanaan Pelayanan KB Di Daerah Kabupaten/Kota</p>	<p>- Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya</p>
			<p>Persentase kampung KB yang memenuhi Indeks Desa Membangun (IDM)</p>	<p>- Terlaksananya Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke</p>	<p>Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)</p>
					<p>- Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)</p>
					<p>Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB</p>



Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya
- Terwujudnya Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)
- Tersedianya Sarana Penunjang Pelayanan KB
- Terlaksananya Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya



- Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB



Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya

Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Masyarakat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB

- Terintegrasinya Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB

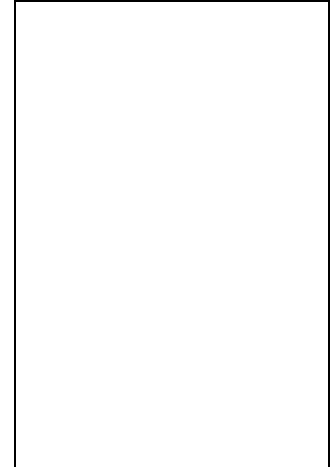
- Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya

Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB

- Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB

Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB

- Terwujudnya Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Kampung Keluarga Berkualitas



- Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)

Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)

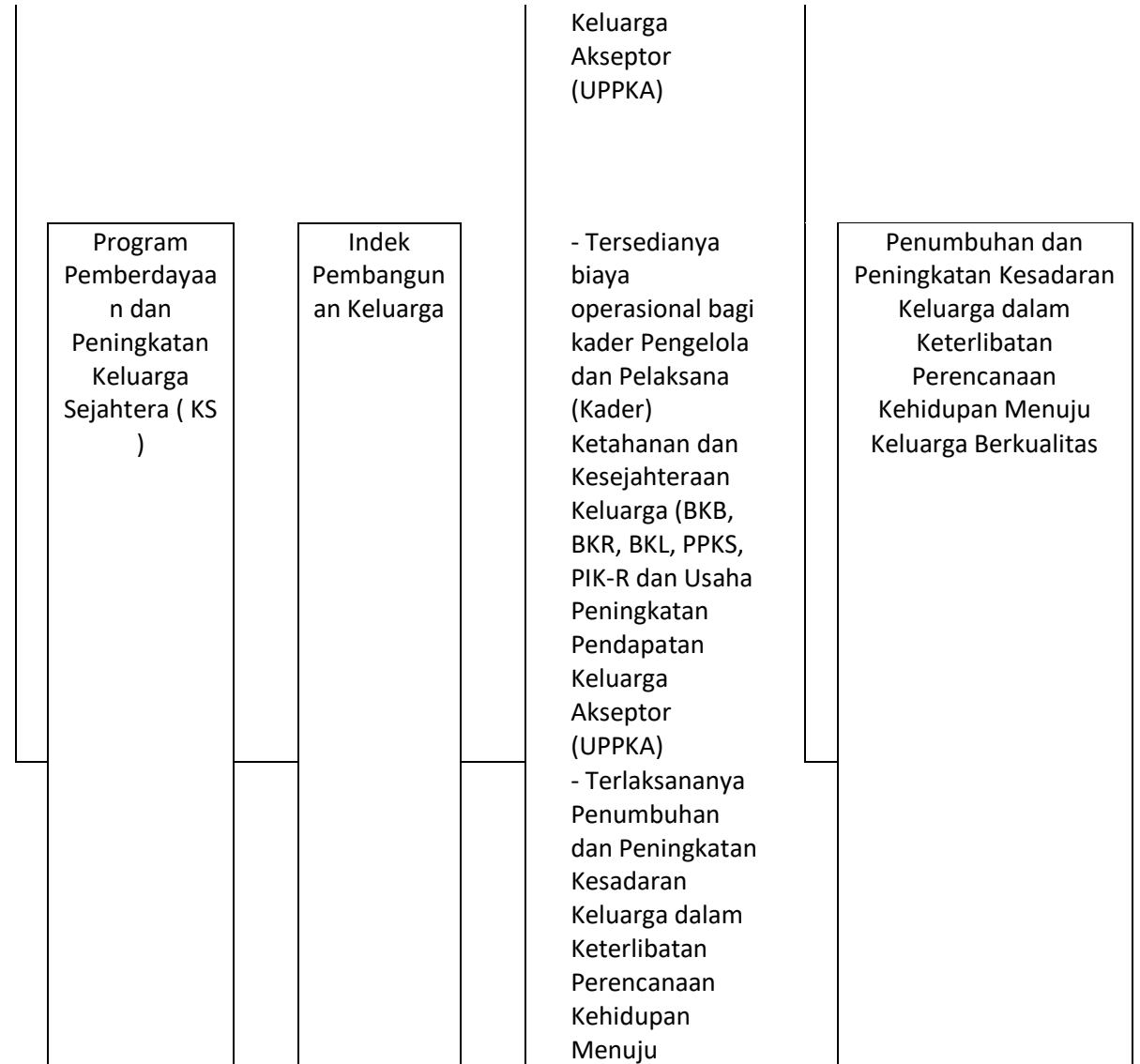
Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

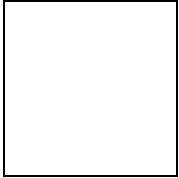
- Terlaksananya Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan

- Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia

Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)

- Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan





Keluarga
Berkualitas



- Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas

Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Masyarakat Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Masyarakat dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)

- Terlaksananya
Pendayagunaan
Mitra Kerja dan
Organisasi
Kemasyarakatan
dalam
Penggerakan
Operasional
Pembinaan
Program
Ketahanan dan
Kesejahteraan
Keluarga (BKB,
BKR, BKL,
PPPKS, PIK-R
dan
Pemberdayaan
Ekonomi
Keluarga/UPPKS
)

- Jumlah Laporan
Pendayagunaan Mitra
Kerja dan Organisasi
Kemasyarakatan dalam
Penggerakan
Operasional Pembinaan
Program Ketahanan
dan Kesejahteraan
Keluarga (BKB, BKR,
BKL, PPPKS, PIK-R dan
Pemberdayaan
Ekonomi
Keluarga/UPPKS)

D. Rencana Anggaran Tahun 2023

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
	Belanja Daerah	16.063.618.528	
	Belanja Operasi	14.570.403.528	
	Belanja Modal	1.493.215.000	
1.	Program perlindungan dan Jaminan Sosial	101.000.000	DIF
2.	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	60.000.000	DAU
3.	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	40.000.000	DAU
4	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	15.000.000	DAU
5	Program Perlindungan Khusus Anak	25.000.000	DAU
7	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4.488.801.528	DAU
8	Program Pengendalian Penduduk	209.350.000	DAK Non Fisik BOKB
9	Program Pembinaan Keluarga Berencana (Kb)	6.601.917.000	DAU dan DAK Non Fisik BOKB
10	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (Ks)	4.315.900.000	DAU dan DAK Non Fisik BOKB

A. Instrumen Pendukung Kinerja

Beberapa inovasi yang telah dikembangkan untuk peningkatan kinerja baik pada Program dan kegiatan di DPPKBPPPA di tahun 2023 meliputi:

- AKSI PENTING (Aplikasi Pemantauan Intervensi Penurunan Stunting).

Aplikasi ini merupakan sistem pelaporan pemberian PMT dan TTD selama 90 hari berturut-turut di Kabupaten Temanggung yang merupakan buah karya tim data manajemen center yang terdiri dari perwakilan penyuluh KB dan TA satgas stunting kabupaten Temanggung.

Melalui aplikasi ini dapat dipantau secara online pelaksanaan pemberian PMT dan TTD di semua desa/kelurahan, perubahan status gizinya setiap bulan,

serta dapat menampilkan secara otomatis info grafis pelaksanaan kegiatan tersebut per desa per kecamatan. Harapannya dengan aplikasi ini akan mempermudah monitoring dan evaluasi kegiatan pemberian PMT dan TTD serentak di Kabupaten Temanggung.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2023

A. CAPAIAN KINERJA

1. Capaian Kinerja Indikator Kinerja Utama

Capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana disajikan berdasarkan hasil pengukuran Indikator Kinerja Utama (IKU). Capaian IKU diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja tujuan yang ditetapkan dalam Renstra, yang selanjutnya diukur berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Pencapaian kinerja sasaran Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana (DPPPAPPKB) Kabupaten Temanggung adalah sebagai berikut:

a. Sasaran Strategis

1. Meningkatnya pengarusutamaan gender serta perlindungan terhadap perempuan dan anak

Pengukuran capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana DPPPAPPKB Tahun 2023 untuk sasaran ini dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi IKU. Dari hasil pengukuran kinerja tersebut, diperoleh data bahwa nilai capaian kinerja sasaran 2 sebesar 100 atau kategori **“Sangat Memuaskan”** sebagaimana tabel 3.1 dibawah ini:

Tabel 3.1
Capaian Indikator Kinerja Utama Sasaran Strategis 1
Tahun 2023

a. Sasaran Strategis 2 : Meningkatnya pengarusutamaan gender serta perlindungan terhadap perempuan dan anak								
Iku	Satuan	Capaian 2022	Tahun 2023			Renstra 2019 - 2023		
			Target	Realisasi	%Capaian	Taget akhir 2023	Capain 2023	Capain kinerja s/d 2023
(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Meningkatnya Indeks Pembangunan Gender	%	100	95,6	95,99	100	95,65	100	100
Menurunnya jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	%	93,45	0,004	0,0025	100	0,004	100	100
Rata-rata Capaian Indikator Kinerja Utama		96,72			100			100

Dari table 3.1 diatas dapat disimpulkan bahwa Capaian dari IKU Indeks Pembangunan Gender sebesar 95,99 dari target 95,6 atau tercapai 100%. Sedangkan Indikator Menurunnya jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak dari target 0,004 tahun 2023 tercapai 0,0025 atau tercapai 100%. Secara keseluruhan Capaian sasaran ini di Tahun 2023 yang sebesar 100% jika dibandingkan dengan capaian tahun 2022 sebesar 96,72%, mengalami kenaikan sebesar 3,28%.

Dari pencapaian sasaran ini ada beberapa faktor yang mendukung indikator tersebut, yang meliputi:

1. Indeks Pembangunan Gender

Faktor Pendorong:

- Tingginya Angka harapan hidup perempuan dibanding laki laki
- Tingginya lamanya sekolah perempuan dibanding laki – laki

Faktor Penghambat adalah:

- Masih rendahnya penghasilan Perempuan dan
- Rata-rata lama sekolah bagi perempuan masih disparitas (perbedaan)

Strategi yang telah dilakukan Dinas PPPAPPKB adalah:

- Sosialisasi dan Advokasi bagi organisasi perempuan dalam rangka memainkan peran aktif perempuan dalam kehidupan berpolitik dan ekonomi (Perempuan di Legeslatif, perempuan profesional dan kontribusi pendapatan perempuan dalam keluarga) yang pada tahun 2023 telah

dilaksanakan kegiatannya pada sub kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG.

- Telah dilaksanakan kegiatan dalam rangka peningkatan ekonomi keluarga yaitu pelatihan PPEP/Peningkatan Pemberdayaan Ekonomi Perempuan dari DIPA kegiatan DP3AKB Provinsi dan DPRD Provinsi.

2. Presentase kasus terhadap perempuan dan anak

Faktor pendorong:

- Adanya jejaring dengan lintas sektoral terkait penanganan kasus

Faktor penghambat:

- Keterbatasan dan kemampuan pendamping dan petugas, belum terbentuknya UPT PPPA
- Anggapan masyarakat kalau melaporkan kasus kekerasan kepada dinas terkait, dikarena melaporkan kasus adalah aib keluarga.

Strategi yang telah dilaksanakan DPPAPPKB untuk mencapai sasaran indikator ini adalah :

1. Peningkatan kapasitas organisasi perempuan dalam rangka peningkatan Pengarusutamaan Gender .
2. Meningkatkan jejering dalam rangka pencegahan ,pelayanan dan pendampingan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak
3. Usulan pembentuksn UPT PPPA
4. Telah dicanangkan aplikasi SIPESAN PERAK (Sistem Informasi pelaporan kekerasan Perempuan dan Anak), agar masyarakat dapat melaporkan kasus kekerasan dalam aplikasi tersebut, untuk memperoleh pelayanan dan pendampingan.

Kinerja sasaran strategis ini didukung melalui pelaksanaan program:

1. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
2. Program Kualitas Keluarga
3. Program Pemenuhan Hak anak /PHA
4. Program Perlindungan Khusus Anak

Untuk mencapai target Kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya pengarusutamaan gender serta perlindungan terhadap perempuan dan anak ini pada tahun 2023 didukung Anggaran sebesar Rp 140.000.000, dengan realisasi sebesar Rp 126.590.750 atau 90,42%. Sehingga efisiensi anggaran sebesar 9,58%, Terkait dengan efisiensi sumber daya adalah terjadi efisiensi sebesar 9,58% (selisih capaian kinerja sebesar 100% dengan realisasi anggaran 90,42 %).

2. Menurunkan Laju Pertumbuhan Penduduk

Pengukuran capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana (DPPPAPPKB) Tahun 2023 untuk sasaran strategis 2 Menurunkan laju pertumbuhan Penduduk dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi IKU. Dari hasil pengukuran kinerja tersebut, diperoleh data bahwa nilai capaian kinerja sasaran 2 sebesar 100 % atau kategori **“Sangat Memuaskan”** sebagaimana tabel 3.2 dibawah ini:

Tabel 3.2
Capaian Indikator Kinerja Utama Sasaran Strategis 2
Tahun 2023

Sasaran Strategis 2 : Menurunkan laju pertumbuhan Penduduk								
Iku	Satuan	Capaian 2022	Tahun 2023			Renstra 2019 - 2023		
			Target	Realisasi	% Capaian	Taget akhir 2023	Capaian 2023	Capain kinerja s/d 2023
(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Menurunnya Laju Pertumbuhan Penduduk	%	100	0,81	0,54	100	0,8	100	100
		100			100			100

Untuk Pencapaian LPP / laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Temanggung sudah cukup baik dibandingkan target yang ada, realisasi capaian kinerja sampai tahun 2023 tercapai 100%, untuk perhitungan LPP, Dinas PPPAPPKB masih menggunakan perhitungan dari BPS, namun masih ada upaya untuk mencapai target yang ada.

Faktor penghambat dari sasaran strategis ini adalah :

- Masih tingginya angka kelahiran

Faktor pendorong tercapainya sasaran ini adalah :

- Meningkatnya KIE oleh petugas tentang pentingnya Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Strategi untuk mencapai sasaran menurunkan laju pertumbuhan penduduk adalah :

- Peningkatan jejaring dalam pelaksanaan program KKBPK Baik pemerintah maupun swasta melakukan Advokasi dan bintek kepada kades dalam program

Keluarga Berencana, sebagai sarana penyediaan data keluarga untuk sasaran pelayanan kegiatan

- Sosialisasi dan advokasi tentang pencegahan dan pelayanan pendampingan kasus dengan memanfaatkan aplikasi SIPESAN PERAK/Sistem pelaporan kasus kekerasan terhadap perempuan .dan anak

Kinerja sasaran strategis ini didukung melalui pelaksanaan program:

1. Program Pengendalian penduduk dan Informasi Keluarga;
2. Program Pembinaan Keluarga Berencana/KB;
3. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera/KS.

Untuk mencapai target Kinerja Sasaran Strategis Menurunkan laju pertumbuhan penduduk ini pada tahun 2023 didukung Anggaran sebesar Rp 11.333.817.000 dengan realisasi Rp 9.173.953.702 Atau sebesar 80,94%, sehingga efesensi anggaran sebesar Rp 2.159.863.298 atau 19.06%. Terkait dengan efisiensi sumber daya adalah terjadi efisiensi sebesar 19.06% (selisih capaian kinerja sebesar 100% dengan realisasi anggaran 80,94%)

3. CAPAIAN KINERJA SASARAN DAN INDIKATOR PROGRAM

Dalam rangka melalukan evaluasi keberhasilan atas pencapaian tujuan dan sasaran organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan pada perencanaan jangka menengah, maka digunakan skala pengukuran sebagai berikut:

Tabel 3.3

Skala Pengukuran Kinerja Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

NO	SKALA CAPAIAN KINERJA	KATEGORI
1	90 - 100	Sangat Memuaskan
2	80,00% - 90,00%	Memuaskan
3	70,00% -80,00 %	Sangat Baik
4	60,00% -70,00%	Baik
5	50,00% -60,00%	Cukup
6	30,00% -50,00%	kurang
7	0-30,00%	Sangat kurang

Program yang harus dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana

(DPPPAPPKB) sejumlah 2 Urusan, 9 Program dengan 2 Sasaran dan 17 Indikator sasaran program.

1.1. URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Sasaran Program

1. Meningkatkan Pengarustamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan

Pengukuran dan analisis terhadap capaian kinerja Sasaran Meningkatnya Pengarustamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja, sebagaimana tabel 3.4 dibawah ini:

Tabel 3.4
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Program 1
Tahun 2023

Sasaran Program 1: Meningkatnya Pengarustamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan								
Indikator Kinerja Program	Satuan	Capaian 2022	Tahun 2023			Renstra 2019 - 2023		
			Target	Realisasi	Capain	Taget akhir 2023	Capaian 2023	Capain kinerja s/d 2023
presentase keterwakilan perempuan di lembaga pemerintah	%	100	2,34	2,42	100	2,34	100	100
Rasio Perangkat daerah yang menerapkan kebijakan responsif gender dalam penyusunan renja PD	%	100	45,71	100	100	45,71	100	100
Rata - rata capaian indikator kinerja program		100						100

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa realisasi capaian kinerja sasaran Meningkatnya Pengarustamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan dengan 2 (dua) Indikator adalah 100%, atau kategori **sangat memuaskan** dan masih sama jika dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya sebesar 100%, hal ini karena Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana DPPPAPPKB pada Tahun 2023 telah melakukan melaksanakan Evaluasi dan monitoring penyusunan Anggaran Responsif Gender di beberapa PD, karena hal ini dalam rangka penilaian APE/Anugrah Parahita Eka praya.

Dari indikator ini tentunya untuk mencapainya ada faktor penghambat dan pendorong yang meliputi :

1. Faktor Pendorong :

- Meningkatnya harapan lama sekolah perempuan, mendorong meningkatnya keterwakilan perempuan dilembaga pemerintah.

2. Faktor Penghambat

- Partisipasi perempuan dalam lembaga pemerintah dipengaruhi oleh peluang seleksi;
- Dari jumlah perempuan dalam angkatan kerja belum bisa mengisi peluang sebagai perempuan yang bekerja dalam lembaga pemerintahan.

Strategi dan langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk mengoptimalkan capaian sasaran dan indikator program ini kedepan adalah:

- Penguatan dan pendampingan dalam penyusunan ARG, dengan mengoptimalkan pokja PUG lewat kegiatan rapat koordinasi dan monev penyusunan anggaran responsif gender.

Kinerja kegiatan yang mendukung Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan adalah :

1. Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota;
2. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota.

Untuk mencapai target Kinerja Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan ini pada tahun 2023 didukung Anggaran sebesar Rp 60.000.000,- dengan realisasi Rp 53.863.850,- Atau sebesar 89,77%, sehingga efisiensi anggaran sebesar Rp 6.136.150,- atau 10,33%. Terkait dengan efisiensi sumber daya adalah terjadi efisiensi sebesar 10,33% (selisih capaian kinerja sebesar 100% dengan realisasi anggaran 89,77%).

Adapun dokumen foto-foto kegiatan yang mendukung baik secara langsung maupun tidak langsung adalah sebagai berikut:

Gambar 3.1
Fasilitasi Pengarustamaan Gender (PUG) dan
Anggaran Responsif Gender (ARG)



Fasilitasi Pengarustamaan Gender (PUG) dan
Anggaran Responsif Gender (ARG)
Senin, 7 Agustus 2023

2. Meningkatnya Perlindungan terhadap perempuan

Pengukuran dan analisis terhadap capaian kinerja Sasaran **Meningkatnya perlindungan terhadap perempuan** yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja, sebagaimana tabel 3.5 dibawah ini:

Tabel 3.5
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Program 2
Tahun 2023

Sasaran Program 1: Meningkatnya Perlindungan terhadap perempuan								
Indikator Kinerja Program	Satuan	Capaian 2022	Tahun 2023			Renstra 2019 - 2023		
			Target	Realisasi	Capain	Taget akhir 2023	Capaian 2023	Capain kinerja s/d 2023
Prevalensi kasus kekerasan terhadap anak perempuan	%	100	0,011	0,005	100	0,011	100	100
Prosentase perempuan korban kekerasan	%	100	0,011	0,0017	100	100	100	100
Rata - rata capaian indikator kinerja program		100			100		100	100

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa realisasi capaian kinerja sasaran **Meningkatnya Perlindungan terhadap perempuan** dengan 2 (dua) Indikator adalah 100%, atau kategori **Sangat Memuaskan** masih sama jika dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya sebesar 100%, hal ini karena Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana DPPAPPKB pada Tahun 2023 telah melakukan pendampingan terhadap korban yang melapor.

Adapun jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan dari tahun 2018 sampai 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.6
Jumlah korban kekerasan Perempuan dan Anak
Kabupaten Temanggung, Tahun 2018 s.d 2023 Triwulan IV

No	Uraian	Tahun					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	KDRT	5	13	9	3	11	3
2	Kekerasan terhadap anak			2	5	0	
3.	Perkosaan			-	-	3	2
4.	Perbuatan tidak menyenangkan		1	7	-	0	3
5	Bulliyng/perundungan			2	-	0	
6.	Pembuangan anak			1	-	0	
7.	Penelantaran	3	6	1	-	1	1
8.	Perzinaan			-	-	0	
9.	Kekerasan terhadap TKW			-	-	0	
10.	Kekerasan dalam pacaran			1	-	0	
11.	Pencurian (ABH)		4	9	-	0	
12.	Sodomi		3	-	-	1	
13.	Kekerasan seksual anak			-		3	
14.	Kekerasan seksual (disabel)		1	-		0	
15.	Pelecehan seksual		4	2	1	0	3
16.	Kekerasan Fisik			-	-	0	1
17.	Persetubuhan Anak	7	10	4	2		
18.	Membawa lari anak			1	-	0	
19.	Pencabulan		4	1		0	
20.	TPPO		1	2	-	0	
21.	Bunuh diri anak		1	-	-	0	
22.	Penganiayaan			-		3	
23	Perampasan					0	
	JUMLAH	15	48	42	11	22	13

Jumlah Kasus selalu fluktuatif karena sangat dipengaruhi oleh laporan dari korban atau pihak lain yang melaporkan kasus tersebut. Kasus kekerasan perempuan dan anak seperti fenomena gunung es, dimana yang

melapor lebih sedikit dibandingkan yang tidak melapor. Hal ini karena banyak yang beranggapan bahwa kekerasan dalam rumah tangga merupakan aib jika dilaporkan, dan sebagian kasus pelaku kejahatan maupun kekerasan adalah dari keluarga terdekat atau juga dari lingkungannya, yang mana penyelesaiannya kasus cukup diselesaikan di tingkat Desa, dan tidak dilaporkan di tingkat Kabupaten.

Kasus-kasus yang disajikan seperti tersebut diatas telah mendapatkan layanan sesuai standar pelayanan, yang meliputi layanan pengaduan, layanan kesehatan, rehabilitasi sosial, penegakan dan bantuan hukum, pemulangan dan reintegrasi sosial. Layanan diberikan oleh lembaga yang berwenang sesuai dengan kebutuhan korban. Penanganan kasus tersebut baru dilakukan oleh lembaga dalam jejaring Pusat Pelayanan Terpadu Penanganan Perempuan dan Anak (P2TP2A) dan Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) di Kecamatan. Dalam rangka menjaring masyarakat agar kasus kekerasan dapat terpantau, Dinas PPPAPKB, pada tanggal 29 juni bertepatan dengan peringatan Harganas tahun 2022, telah mencanangkan aplikasi SIPESANPERAK (Sistem Pelaporan Kekerasan Perempuan dan Anak) sebagai aplikasi yang bisa diakses oleh masyarakat dalam pelaporan kasus.

Untuk mencapai target Kinerja Program Perlindungan Perempuan ini pada tahun 2023 tidak ada dukungan anggaran baik dari DAU maupun dari DAK jadi efisiensi sebesar 100%.

Adapun dokumen foto-foto kegiatan yang mendukung baik secara langsung maupun tidak langsung adalah sebagai berikut:

Gambar 3.2

Sosialisasi Pencegahan Bullying



Sosialisasi Pencegahan Bullying di SMP Muhammadiyah 5 Kandungan
Selasa, 3 Oktober 2023

3. Meningkatnya Kualitas Keluarga

Pengukuran dan analisis terhadap capaian kinerja Sasaran Meningkatnya Kualitas Keluarga yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja, sebagaimana tabel 3.7 dibawah ini

Tabel 3.7
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Program 3
Tahun 2023

Sasaran Program 1: Meningkatnya Kualitas Keluarga								
Indikator Kinerja Program	Satuan	Capaian 2022	Tahun 2023			Renstra 2019 - 2023		
			Target	Realisasi	Capain	Taget akhir 2023	Capaian 2023	Capain kinerja s/d 2023
Persentase desa sayang ibu dan bayi	%	63,89	62,28	100	100	62,28	100	100
Persentasre rumah sakit sayang ibu dan bayi	%	100	100	100	100	100	100	100
Rata – rata capaian indikator kinerja program		81,94			100			100

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa realisasi capaian kinerja sasaran **Meningkatnya Kualitas Keluarga** dengan 2 (dua) Indikator adalah 100%, atau kategori **“Sangat Memuaskan”** capaian ini lebih tinggi dari capaian tahun sebelumnya 81,94% hal ini karena Dinas Pemberdayaan

Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana (DPPPAPPKB) pada Tahun 2023 telah melakukan sosialisasi pada masyarakat terkait hal tersebut, namun demikian belum semua bisa dilaksanakan karena kegiatan yang mendukung program ini yaitu gerakan sayang ibu, belum semua desa menganggarkan kegiatan tersebut, dan baru sebatas integrasi dengan kegiatan lainnya. Dan perlu peningkatan advokasi, KIE dan koordinasi semua pihak terutama kinerja satgas GSI dalam menurunkan AKI dan AKB.

Persentase Desa sayang ibu dan bayi di Kabupaten Temanggung dari tahun 2017 sampai 2022 seperti pada tabel 3.8 dibawah ini:

Tabel. 3.8
Presentase Gerakan Sayang Ibu
Kabupaten Temanggung, tahun 2018 sampai dengan 2023

No	Uraian	Tahun					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah desa sayang ibu dan bayi	62	82	82	91	115	289
2	Jumlah desa	289	289	289	289	289	289
	Persentase	21,45	28,37	28,37	31,49	39,76	100

Dari tabel diatas, jumlah desa yang sudah mempunyai satgas GSI, dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2023 triwulan IV sejumlah 289 Desa/100% dari jumlah desa sebanyak 289. Kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka menurunkan AKB dan AKI, diantaranya adalah dengan integrasi kegiatan yang ada ditingkat desa yaitu desa Siaga dan memaksimalkan FKD/Forum.

Adapun beberapa faktor yang mempengaruhi capaian indikator ini adalah:

Faktor pendorong:

- Peningkatan komitmen pemerintah dan keserasan masyarakat terhadap pentingnya pencegahan kematian ibu dan bayi, dengan mensosialisasi 3T dan 4 terlalu.

Faktor Penghambat:

- Masih adanya budaya masyarakat bahwa kehamilan, dan melahirkan menjadi urusan perempuan.

Kinerja kegiatan yang mendukung program Peningkatan kualitas Keluarga adalah :

1. Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak tingkat Daerah Kabupaten/Kota Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota;
2. Penguatan dan pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang wilayah kerjanya dalam daerah Kabupaten/Kota.

Untuk mencapai target Kinerja Program Kualitas Keluarga ini pada tahun 2023 didukung Anggaran sebesar Rp15.000.000,- dengan realisasi Rp 14.280.000,- Atau sebesar 95,00%, sehingga efesensi anggaran sebesar Rp 770.000,- atau 5%. Terkait dengan efisiensi sumber daya adalah terjadi inefisiensi sebesar 5% (selisih capaian kinerja sebesar 100%) dengan realisasi anggaran 95,00%.

4. Terpenuhinya Hak anak

Pengukuran dan analisis terhadap capaian kinerja Sasaran **Terpenuhinya Hak anak** yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja, sebagaimana tabel 3.9 dibawah ini

Tabel 3.9
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Program 4
Tahun 2023

Sasaran Program 1: Terpenuhinya Hak anak								
Indikator Kinerja Program	Satuan	Capaian 2022	Tahun 2023			Renstra 2019 - 2023		
			Target	Realisasi	Capain	Target akhir 2023	Capaian 2023	Capain kinerja s/d 2023
Persentase terbentuknya kota layak anak	%	100	50	80	100	60	100	100
Rata – rata capaian indikator kinerja program		100			100			100

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa realisasi capaian kinerja sasaran **Terpenuhinya hak anak** adalah 100%, atau kategori **“Sangat Memuaskan”**. Capaian ini masih sama dengan tahun sebelumnya sebesar

100%, hal ini karena Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana (DPPPAPPKB) pada Tahun 2023 telah melaksanakan sosialisasi tentang kecamatan layak anak dan desa layak anak.

Untuk mencapai target kinerja tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor dan perlu strategi yang telah dan akan dilaksanakan yang meliputi:

Faktor Pendorong :

- Adanya Integrasi dengan program lain yang mendukung Kelana (Kecamatan layak anak).

Faktor Penghambat :

- Masih rendahnya pendampingan dalam pelaksanaan Kelana;
- Masih kurangnya pemahaman stakeholder terutama ditingkat desa dan lintas sektoral dalam mendukung terbentuknya desa layak anak, karena dari 16 kecamatan yang telah dicanangkan dalam mendukung kota layak anak belum semua desa mencanangkan desa layak anak.

Strategi

- Penguatan dalam melakukan pendampingan kelana dan dekela;
- Melibatkan forum Anak untuk sosialisasi sampai tingkat desa.

Kinerja kegiatan yang mendukung program ini adalah:

- Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota

Untuk mencapai target Kinerja Program Pemenuhan hak anak/PHA ini pada tahun 2023 didukung Anggaran sebesar Rp50.000.000,- dengan realisasi Rp 43.122.000,- Atau sebesar 86,24%, sehingga efisiensi anggaran sebesar 6.878.000,- atau 13,76%. Terkait dengan efisiensi sumber daya adalah terjadi efisiensi sebesar 13,76% (selisih capaian kinerja sebesar 100 % dengan realisasi anggaran 86,24%).

Adapun dokumen foto-foto kegiatan yang mendukung baik secara langsung maupun tidak langsung adalah sebagai berikut:

5. Meningkatnya perlindungan khusus anak

Pengukuran dan analisis terhadap capaian kinerja Sasaran: Meningkatnya perlindungan khusus anak yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja, sebagaimana tabel 3.10 dibawah ini:

Tabel 3.10
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Program 5
Tahun 2022

Sasaran Program 1: Meningkatnya perlindungan khusus anak								
Indikator Kinerja Program	Satuan	Capaian 2022	Tahun 2023			Renstra 2019 - 2023		
			Target	Realisasi	Capain	Taget akhir 2023	Capaian 2022	Capain kinerja s/d 2021
Persentase anak korban kekerasan	%	100	0,01	0,0048	100	0,01	100	100
Rata - rata capaian indikator kinerja program		100			100			100

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa realisasi capaian kinerja sasaran **Meningkatnya Perlindungan khusus anak** dengan 1 (satu) Indikator adalah 100%, atau kategori "**Sangat Memuaskan**", capaian ini masih sama jika dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya sebesar 100%, hal ini karena Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana (DPPPAPPKB) pada Tahun 2023 telah melakukan sosialisasi pada masyarakat terkait hal tersebut.

Untuk mencapai target kinerja tersebut, dipengaruhi oleh beberapa faktor, dan perlu strategi yang telah dan akan dilaksanakan yang meliputi:

Faktor Pendorong :

- Adanya Integrasi dengan program lain yang mendukung Kelana (Kecamatan layak anak)

Faktor Penghambat :

- Masih rendahnya pendampingan dalam pelaksanaan Kelana
- Masih kurangnya pemahaman stakeholder terutama ditingkat desa dan lintas sektoral dalam pendukung terbentuknya desa layak anak, karena dari 16 kecamatan yang telah dicanangkan dalam mendukung kota layak anak belum semua desa mencanangkan desa layak anak

Strategi

- Penguatan dalam melakukan pendampingan kelana dan dekela

Melibatkan forum Anak untuk sosialisasi sampai tingkat desa.

Kinerja kegiatan untuk pencapaian program ini adalah :

- Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota.
- Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Untuk mencapai target Kinerja Program Perlindungan Khusus Anak ini pada tahun 2022 didukung Anggaran sebesar Rp 264.303.000 dengan realisasi Rp 104.248.441,- Atau sebesar 39,44% sehingga efesensi anggaran sebesar Rp 160.054.559,- atau 60,56%. Terkait dengan efisiensi sumber daya adalah terjadi efisiensi sebesar 60,56% (selisih capaian kinerja sebesar 100% dengan realisasi anggaran 39.44%).

Adapun dokumen foto-foto kegiatan yang mendukung baik secara langsung maupun tidak langsung adalah sebagai berikut:

Gambar 3.3



Pengembangan Kegiatan Perlindungan Perempuan Kelompok Rentan dan Pencegahan Kekerasan Bersama Mitra di Kabupaten Temanggung Rabu, 20 September 2023

1.2. URUSAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Sasaran Program 6 : Terkendalinya laju Pertumbuhan Penduduk dan tersampainya informasi keluarga

Pengukuran dan analisis terhadap capaian kinerja Sasaran: Terkendalinya laju Pertumbuhan Penduduk dan tersampainya informasi

keluarga yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja, sebagaimana tabel 3.10 dibawah ini:

Tabel 3.11
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Program 6
Tahun 2023

Sasaran Program 1 Terkendalinya laju Pertumbuhan Penduduk dan tersampainya informasi keluarga								
Indikator Kinerja Program	Satuan	Capaian 2022	Tahun 2023			Renstra 2019 - 2023		
			Target	Realisasi	Capain	Taget akhir 2023	Capaian 2022	Capain kinerja s/d 2022
Persentase Penyediaan Data Mikro Keluarga di Desa/ Kel.	%	100	100	100	100	100	100	100
Persentase pasangan usia subur yang ingin ber-KB tidak terpenuhi/ unmetneed		79,40	9,17	8,60	100	9,17	100	100
Presentase pasangan usia subur yang istrinya dibawah usia 20 tahun		100	2,04	1,02	100	2.04	100	100
Angka kelahiran remaja usia 15-19 th (ASFR 15-19th)		100	26.3	14,10	100	26,30	100	100
Rata - rata capaian indikator kinerja program		93,55			100			100

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa realisasi capaian kinerja sasaran **Terkendalinya laju Pertumbuhan Penduduk dan tersampainya informasi keluarga** dengan 4 (empat) Indikator adalah 100%, atau kategori **“Sangat memuaskan”**, capaian ini lebih tinggi jika dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya yang hanya sebesar 93,55%.

Untuk mencapai target kinerja program tersebut, dipengaruhi oleh beberapa faktor, dan perlu strategi yang telah dan akan dilaksanakan yang meliputi:

Faktor Pendorong :

- Adanya kegiatan Pendataan dan *update* data keluarga
- Meningkatnya Kegiatan KIE kepada PUS untuk Ber-KB
- Meningkatnya koordinasi dengan faskes dan jejaring dalam rangka pelayanan KB
- Peningkatan KIE dan Advokasi kepada tokoh formal dan no formal Tentang Penundaan Usia Perkawinan/PUP

Faktor Penghambat :

- Lemahnya sistem pelaporan (RR) dan administrasi di tingkat RT
- Kurangnya Pengetahuan Masyarakat tentang pentingnya ikut KB Rendahnya pemahaman batasan PUS bisa hamil (merasa tua tidak perlu KB)
- Masih kurangnya SDM pengelola program KKBPK dilapangan dalam memberikan advokasi dan KIE pada masyarakat dan remaja
- Kepercayaan dan Agama, yang melarang untuk menggunakan alat Kontrasepsi tertentu

Strategi yang telah dan yang akan dilakukan:

- Peningkatan KIE dan Advokasi kepada Stakeholder Tentang Penundaan Usia Perkawinan /PUP
- Peningkatan pelayanan peserta KB, dalam moment strategis
- Inovasi untuk mendukung kegiatan menurunkan TFR dan Unmetneed adalah SIMANTAP KON KB yaitu aplikasi sitem pelaporan kontrasepsi KB, tujuannya untuk mengakses data PUS yang berKB dan yang tidak berKB untuk sasaran KIE dan pelayanan KB

Kinerja kegiatan yang mendukung program ini adalah :

- Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota
- Pembinaan dan Pengawasan Penelenggaraan Sistem Informasi Keluarga
- Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga
- Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB

Untuk mencapai target Kinerja Program Pengendalian penduduk dan informasi keluarga ini pada tahun 2023 didukung Anggaran sebesar Rp 416.000.000,- dengan realisasi Rp 335.051.056,- Atau sebesar 80,54%, sehingga efesensi anggaran sebesar Rp 80.948.944,- atau 19,46%. Terkait dengan efisiensi sumber daya adalah terjadi efisiensi sebesar 19,46% (selisih capaian kinerja sebesar 100% dengan realisasi anggaran 80,54%).

Adapun dokumen foto-foto kegiatan yang mendukung baik secara langsung maupun tidak langsung adalah sebagai berikut:

Sasaran Program 7 : Meningkatkan pembinaan Keluarga Berencana

Pengukuran dan analisis terhadap capaian kinerja Sasaran: Meningkatnya pembinaan Keluarga Berencana yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja, sebagaimana tabel 3.11 dibawah ini

Tabel 3.11
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Program 7
Tahun 202

Sasaran Program 7 Meningkatnya pembinaan Keluarga Berencana								
Indikator Kinerja Program	Satuan	Capaian 2022	Tahun 2023			Renstra 2019 - 2023		
			Target	Realisasi	Capain	Taget akhir 2023	Capaian 2023	Capain kinerja s/d 2023
presentase PUS yang memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang semua jenis metode kontrasepsi modern	%	100	75,21	80,14	100	76,21	100	100
Persentase kepesertaan KB aktif	%	100	75,21	80,14	100	76,21	100	100
Persentase keberhasilan pemakaian metode kontrasepsi jangka panjang	%	91,53	49,19	47,17	93,14	49,19	93,14	93,14
Persentase kampung KB yang memenuhi Indeks Desa Membangun (IDM)		99,84	33,9	52,71	100	33,9	100	100
Rata - rata capaian indikator kinerja program		97,84			98,28			98,28

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa realisasi capaian kinerja sasaran **Meningkatnya pembinaan Keluarga Berencana** dengan 4 (empat) Indikator adalah 98,28%, atau kategori **“Sangat Memuaskan”**, capaian ini lebih tinggi jika dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya yang hanya sebesar 97,34%, untuk Pencapaian target kinerja ini tentunya dipengaruhi oleh beberapa faktor dan perlu upaya strategi yang harus dilakukan oleh DPPPAPPKB :

Faktor Pendorong :

- Tingginya kesadaran masyarakat (PUS) untuk berKB;
- Tingginya Animo Masyarakat dalam penggunaan alakon Implan;

- Pemahaman masyarakat tentang alat kontrasepsi MKJP lebih efektif dan praktis;
- program kerja secara keseluruhan bisa terlaksana secara lintas sektoral.

Faktor Penghambat :

- Tidak semua masyarakat dengan keyakinan tertentu menerima jenis alat kontrasepsi modern. PUS muda yang menikah diusia dini belum terbekali dengan pengetahuan jenis alokon;
- PUS muda yang menikah diusia dini belum terbekali dengan pengetahuan jenis alokon;
- Masih adanya PUS yang trauma menggunakan alat kontrasepsi MKJP, karena efek dari Rumor penggunaannya;
- Masih kurangnya Partisipasi masyartakat dalam mendukung kampung KB.

Strategis :

- Adanya inovasi berupa aplikasi SIMATAPKON KB (Sistem Informasi Managemen Pencatatan dan Pelaporan Kontrasepsi Keluarga Berencana), sehingga bisa mengetahui segmentasi sasaran dalam pelayanan KB;
- Melakukan promosi, KIE melalui media cetak dan elektronik;
- Peningkatan kapasitas tim pengelola KKBPK dari institusi yang paling bawah;
- Peningkatan advokasi dan KIE dengan melibatkan LSOM melakukan jejaring dalam pelaksanaan program kampung KB;

Kinerja kegiatan yang mendukung program ini adalah :

- Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal;
- Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB);
- Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota;

- Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB;

Untuk mencapai target Kinerja Program Pembinaan Keluarga Berencana ini pada tahun 2023 didukung Anggaran sebesar Rp6.601.917.000,- dengan realisasi Rp5.043.732.296,- atau sebesar 76,40%, sehingga efesensi anggaran sebesar Rp1.558.184.704,- atau 23,60%. Terkait dengan efisiensi sumber daya adalah terjadi efisiensi sebesar 21,28% (selisih capaian kinerja sebesar 97,84% dengan realisasi anggaran 17,87%).

Adapun dokumen foto-foto kegiatan yang mendukung baik secara langsung maupun tidak langsung adalah sebagai berikut:

Gambar 3.4
Pelayanan KB MKJP MOW



Rangkaian acara peringatan Hari Kesehatan Nasional (HKN)
Kabupaten Temanggung Tahun 2023,
Senin 23 Oktober 2023

Gambar 3.5
Pelayanan KB MKJP MOW



Rangkaian acara peringatan Hari Kesehatan Nasional (HKN) dan Hari Jadi Kabupaten Temanggung Tahun 2023, Senin 30 Oktober 2023

Gambar 3.6
Pelayanan KB MKJP MOW



Rangkaian acara peringatan Hari Jadi Kabupaten Temanggung dan Kesatuan Gerak PKK Tahun 2023, Kamis 2 November 2023

Gambar 3.7
Pelatihan Pengisian Sistem Informasi Keluarga (SIGA) dan Simantap Kon KB bagi PPKBD



Pelatihan Pengisian Sistem Informasi Keluarga (SIGA) dan Simantap Kon KB bagi PPKBD
Rabu, 8 November 2023

Sasaran Program 8 : Meningkatnya pemberdayaan dan Peningkatan keluarga Sejahtera

Pengukuran dan analisis terhadap capaian kinerja sasaran **Meningkatnya pemberdayaan dan Peningkatan keluarga Sejahtera** yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja, sebagaimana tabel 3.12 dibawah ini:

Tabel 3.12
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Program 8
Tahun 2023

Sasaran Program 8: : Meningkatnya pemberdayaan dan Peningkatan keluarga Sejahtera								
Indikator Kinerja Program	Satuan	Capaian 2022	Tahun 2023			Renstra 2019 - 2023		
			Target	Realisasi	Capain	Taget akhir 2023	Capaian 2022	Capain kinerja s/d 2022
Indek Pembangunan Keluarga	%	100	50	58,19	100	50	100	100
Rata – rata capaian indikator kinerja program		100			100			100

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa realisasi capaian kinerja sasaran **Meningkatnya pemberdayaan dan Peningkatan keluarga Sejahtera** dengan 1 (satu) Indikator adalah 100%, atau **“Sangat Memuaskan”** capaian ini masih sama jika dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya dikarena indikator ini meruapakan indikator baru pada perubahan renstra 2018–2023.

Adapun Indek Pembangunan Keluarga adalah pengukuran kualitas keluarga yang ditujukan melalui ketentraman, kemandirian, dan kebahagiaan keluarga, salah satu yang dihasilkan oleh iBangga adalah terpotretnya gambaran akan peran dan fungsi keluarga.

Rumus Indek Pembangunan Keluarga menggunakan pendekatan dimensi yang dibentuk dari 17 Variabel, 3 dimensi yang ditentukan mencakup:

1. Dimensi Ketentraman
2. Dimensi Kemandirian
3. Dimensi Kebahagiaan

Perhitungan IPK, berdasarkan hasil Pendataan Keluarga tahun 2022/PK22 yang perhitungannya dihitung oleh BKKBN. Untuk Pencapaian target kinerja ini tentunya dipengaruhi oleh beberapa faktor dan perlu upaya strategi yang harus dilakukan oleh DPPPAPPKB :

Faktor Pendorong :

- Meningkatnya faktor Ekonomi, Sosial dan Pendidikan dalam keluarga.

Faktor Penghambat :

- Masihnya lemahnya pemahaman keluarga tentang indikator peningkatan kesejahteraan keluarga.

Strategi dan langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk mengoptimalkan Capaian sasaran dan indikator program ini kedepan adalah:

- Perlunya pemahaman tentang perhitungan IPK, Karena perhitungan bukan wewenang PD.

Kinerja kegiatan yang mendukung capaian program ini adalah :

- Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

Kegiatan capaian program untuk tahun 2023 diprioritaskan untuk upaya penurunan angka Stunting di Kabupaten Temanggung. Untuk mencapai target Kinerja Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera ini pada tahun 2023 didukung Anggaran sebesar Rp4.315.900.000,- dengan realisasi Rp3.747.203.350,- atau sebesar 86,82%, sehingga efesensi anggaran sebesar Rp568.696.650,- atau 13,18%. Terkait dengan efisiensi sumber daya adalah terjadi efisiensi sebesar 13,18% (selisih capaian kinerja sebesar 100% dengan realisasi anggaran 86,82%) untuk Capaian anggaran dalam kegiatan ini bisa dikategorikan masih kecil, dikarenakan ada beberapa hambatan yaitu kegiatan survilan oleh Kader Tim Pendamping Keluarga/TPK belum optimal.

Dari semua indikator program dan kegiatan pada akhir tahun 2023, ada tambahan 1 program lagi yang kegiatannya didanai dari Dana Instensif Fiskal yaitu Program Perlindungan Jaminan Sosial, dengan kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota dengan sub kegiatan Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka pengentasan kemiskinan dan penurunan angka stunting di Kabupaten Temanggung dengan anggaran sebesar Rp. 101.000.000,- yang terealisasikan Rp 91.290.000,- atau 90,39% dan sisa anggaran sebesar Rp 9.710.000,- atau 9,61%.

Dari capaian sasaran strategis indikator kinerja utama Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentunya juga didukung oleh urusan penunjang yaitu program Penunjang urusan Perangkat Daerah pada tahun 2023 yaitu pada tabel 3.13 berikut ini:

Tabel 3.13
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Program 8
Tahun 2023

Sasaran Program Terpenuhinya urusan Penunjang Perangkat Daerah								
Indikator Kinerja Program	Satuan	Capaian 2022	Tahun 2023			Renstra 2019 - 2023		
			Target	Realisasi	Capain	Taget akhir 2023	Capaian 2023	Capain kinerja s/d 2023
Terpenuhinya Urusan Penunjang Perangkat Daerah	%	99,62	100	93,82	93,82	100	93,82	93,82

Untuk mencapai target Kinerja Program penunjang urusan Daerah ini pada tahun 2023 didukung Anggaran sebesar Rp 4.488.801.528,- dengan realisasi Rp 4.105.664.141,- atau sebesar 91,46%, sehingga efesensi anggaran sebesar Rp 383.137.387,- atau 8,5%. Terkait dengan efisiensi sumber daya adalah terjadi inefisiensi sebesar 8,5% (selisih capaian kinerja sebesar 93,82% dengan realisasi anggaran 95,86%).

Adapun kegiatan yang mendukung meliputi:

- a. Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah. Kegiatannya antara lain
 - Kegiatan Penyediaan gaji dan tunjangan ASN dengan target capaian 30 ASN telah tercapai 30 ASN atau 100%
- b. Pelayanan Administrasi Umum Perangkat daerah, kegiatannya antara lain:
 1. Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor dengan target capaian 4 paket telah tercapai 4 Paket atau 100%
 2. Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor dengan target capaian 4 paket telah tercapai 4 paket atau 100%
 3. Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan dengan target capaian 12 laporan telah tercapai 12 laporan atau 100 %
 4. Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu dengan target capaian 12 laporan telah tercapai 19 atau 75%
 5. Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan target capaian 12 laporan telah tercapai 12 laporan atau 100%
 6. Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat dengan capaian 12 laporan telah tercapai 12 laporan atau 100%

7. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan target capaian 12 laporan telah tercapai 12 laporan atau 100%
 8. Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dengan target capaian 12 laporan telah tercapai 12 laporan atau 100%
- c. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1. Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dengan target capaian 2 unit telah tercapai 2 unit atau 100%
 2. Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dengan target capaian 105 unit telah tercapai 80 unit atau 76%
 3. Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya target capaian 2 unit telah tercapai 2 unit atau 100 %.

Strategi yang telah dilakukan Dinas PPPAPPKB, adalah :

- Pengoptimalisasi Sumber daya yang ada baik Sumber daya manusia maupun sarana prasarana yang tersedia.
- Memprioritaskan kegiatan sesuai dengan kebutuhan yang mendesak
- Efisiensi penggunaan barang persediaan

Adapun pencapaian kinerja program dirinci dalam tabel 3.13 sebagai berikut:

Tabel 3.13
Pencapaian Kinerja Program

NO	Sasaran	Jumlah indikator	Rata - rata Capaian	Keterangan (kategori)
1	Program Pengarustamaan gender dan pemberdayaan perempuan	2	100	Sangat Memuaskan
2	Program Perlindungan Perempuan	2	100	Sangat Memuaskan
3	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	2	100	Sangat Memuaskan

4	Program Pemenuhan Hak Anak /PHA	1	100	Sangat Memuaskan
5	Program Perlindungan Khusus Anak	1	100	Sangat Memuaskan
6	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah kabupaten / kota	1	93,82	Sangat memuaskan
7	Program Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga	4	100	Sangat Memuaskan
8	Program Pembinaan Keluarga Berencana	4	98,29	Sangat Memuaskan
9	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera	1	100	Sangat Memuaskan

B. AKUNTABILITAS KEUANGAN

1. Laporan Realisasi anggaran tahun 2023

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana pada tahun anggaran 2023 di dukung dengan anggaran sebesar Rp. 16.063.618.528,- anggaran tersebut berasal dari APBD, DAK dan DIF secara ringkas komposisi penggunaan sebagai berikut :

Realisasi anggaran tahun 2023 Per 31 Desember 2023

No	Program kegiatan	Pagu anggaran	Realisasi	%
1	2	3	4	$5=4/3*100$
	BELANJA DAERAH	16.063.618.528	13.497.498.593	84,03

URUSAN PEMEBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				
A	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	60.000.000	53.863.850	89,77
1	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	30.000.000	25.206.250	84,02
a	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	30.000.000	25.206.250	84,02
2	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	30.000.000	28.657.600	95,53
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	30.000.000	28.657.600	95,53
C	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	40.000.000	38.993.650	97,48
6	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak tingkat Daerah Kabupaten/Kota	10.000.000	9.659.250	96,59
	Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	10.000.000	9.659.250	96,59
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	30.000.000	29.334.400	97,78
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	30.000.000	29.334.400	97,78
D	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	15.000.000	14.280.000	95,20

7	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	15.000.000	14.280.000	95,20
	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	15.000.000	14.280.000	95,20
E	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	25.000.000	19.453.250	77,81
9	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	25.000.000	19.453.250	77,81
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	25.000.000	19.453.250	77,81
URUSAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA				
F	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.488.801.528	4.105.664.141	91,46
10	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.665.387.428	3.323.282.266	90,67
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.665.387.428	3.323.282.266	90,67
11	Administrasi Umum Perangkat Daerah	67.350.000	64.221.500	95,35
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.000.000	1.996.800	99,84
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12.500.000	12.474.500	99,80
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	9.820.000	9.820.000	0
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	13.030.000	9.931.150	76,22

	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30.000.000	29.999.050	99,996
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	660.814.100	635.488.375	96,17
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12.000.000	10.049.300	83,74
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	39.100.000	27.436.701	70,17
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10.000.000	9.898.400	98,98
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	599.714.100	588.103.974	98,06
12	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	95.250.000	82.672.000	86,79
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	19.000.000	17.905.000	94,24
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	46.250.000	34.896.500	72,61
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	25.000.000	24.937.000	72,83
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	5.000.000	4.933.500	
G	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	416.000.000	383.018.056	92,07
	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Dalam Rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	50.000.000	47.967.000	95,03
	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design	50.000.000	47.967.000	95,93

	Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota			
	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	366.000.000	335.051.056	91,54
	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	64.200.000	56.165.500	87,49
	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	205.800.000	205.800.000	100
	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	96.000.000	73.085.556	76,13
	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	6.601.917.000	5.043.732.296	76,40
	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	1.405.400.000	1.068.402.132	76,02
	Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	145.000.000	67.346.800	46,45
	Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	150.000.000	132.348.500	88,23
	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	260.000.000	133.930.750	51,51
	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	770.400.000	675.285.832	87,65
	Pengendalian Program KKBPK	80.000.000	59.490.250	74,36
	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	624.000.000	607.850.000	97,41
	Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	46.000.000	46.000.000	100
	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	578.000.000	561.850.000	97,21
	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi	3.556.017.000	2.691.942.814	75,70

	serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota			
	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	27.900.000	24.259.500	86,95
	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	1.994.982.000	1.188.538.550	59,58
	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	1.516.035.000	1.462.247.264	96,45
	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya	17.100.000	16.897.500	98,86
	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	1.016.500.000	675.537.350	66,46
	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	9.000.000	8.750.000	97,22
	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	1.007.500.000	666.787.350	66,18
	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	4.315.900.000	3.747.203.350	86,82
	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	4.265.900.000	3.698.859.950	86,71
	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	360.000.000	356.311.750	98,98
	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader)	3.855.900.000	3.292.683.700	85,39

	Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)			
	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	50.000.000	49.864.500	99,73
	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	50.000.000	48.343.400	96,69
	Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	50.000.000	48.343.400	96,69

Kinerja Anggaran Pencapaian Sasaran Strategis DPPKBPPPA Kabupaten Temanggung Tahun 2023

Tabel 3.14
Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2023

No	Rekening	Anggaran	Realisasi	Sisa	prosentase
	Belanja Daerah	16.063.618.528	13.497.498.593	2.566.119.935	84,03%
	BELANJA OPERASI	14.570.403.528	12.054.174.367	2.516.229.161	82,73%
	Belanja modal	1.493.215.000	1.443.324.226	49.890.774	96,65%

Sumber : Laporan Keuangan DPPPAPPKB

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa capaian anggaran DPPPAPPKB Kabupaten Temanggung Tahun 2023 untuk total belanja sebesar Rp13.497.498.593 dari total anggaran Rp16.063.618.528,- atau 84,03%.

1. Analisa Efisiensi

Capaian realisasi anggaran di setiap program/kegiatan dan sasaran strategis dapat menggambarkan efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Apabila dicermati dapat dilihat bahwa efisiensi anggaran per sasaran strategis di DPPKBPPPA Kabupaten Temanggung adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1.
Kinerja Efisiensi Anggaran per Sasaran Strategis

No	Sasaran Strategis	% Realisasi Anggaran	% Capaian Kinerja	Efisiensi
1	Meningkatnya Pengarusutamaan Gender serta Perlindungan terhadap Perempuan dan Anak	90,42%	100%	9,58 %
1	Terkendalinya laju pertumbuhan penduduk	80,94 %	100 %	19,06 %
	Rata-Rata	85,68%	100%	14,32 %

Dibandingkan dengan rata-rata capaian kinerja sebesar 100% maka realisasi sebesar 85,68% menunjukkan adanya efisiensi penggunaan dana sebesar 14,32%. Beberapa hal yang menimbulkan adanya efisiensi anggaran diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Pembinaan untuk kelompok kegiatan dimasyarakat dilaksanakan lewat media sosial;
2. Pembatasan pertemuan atau rapat-rapat koordinasi membuat penyediaan makanan dan minuman rapat tidak terealisasi secara maksimal;
3. Penggunaan aplikasi *zoom meeting* menghemat biaya untuk koordinasi dan konsultasi luar daerah;
4. Ada beberapa kegiatan yang sama, bisa berintegrasi dengan kegiatan yang bersumber dari swakelola II/Perwakilan BKKBN Propinsi, dan Swakelola I dari BKKBN Pusat;
5. Anggaran layanan dan pendampingan kasus tergantung dari jumlah korban yang melapor dan ditangani.

PRESTASI DAN PENGHARGAAN

Prestasi DPPKBPPPA Kabupaten Temanggung dalam mendukung fungsi penunjang program PPPA dan PPKB adalah ;

1. Penghargaan Kabupaten Parahita Ekapraya Tahun 2022 yang diberikan pada tahun 2023, dengan kategori Madya;
2. Penghargaan sebagai Kota Layak Anak (KLA), dengan peringkat Madya Tahun 2022 yang diberikan pada tahun 2023;





BAB IV

P E N U T U P

A. Tinjauan Umum Capaian Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Kabupaten Temanggung sebagai SKPD teknis yang mempunyai tugas pokok menyusun kebijakan, mengkoordinasikan dan melaksanakan urusan pemerintah di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, mempunyai fungsi untuk memberikan pelayanan di bidang Keluarga berencana dan pemberdayaan perempuan pada masyarakat. Agar pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut berjalan secara optimal maka diperlukan pengelolaan SDM, sumber dana dan sarana secara efektif dan efisien. Dengan memperhatikan uraian dan beberapa data di atas, maka dapat dikatakan bahwa Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam melaksanakan tugasnya dapat dikatakan berhasil, karena semua target sasaran yang telah ditetapkan dicapai dengan kategori **Sangat Memuaskan**, Hal tersebut didukung dengan data sebagai berikut :

- a. Hasil Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS) secara keseluruhan dengan pencapaian rata – rata sebesar 100%,
- b. Dinas PPPAPKB menggunakan dana lebih kecil dari dana yang dianggarkan, dengan penyerapan dana sebesar 71,64% Hal ini berarti terjadi efisiensi anggaran yang disediakan.

B. Strategi Untuk Peningkatan Kinerja di masa mendatang

Strategi yang diperlukan guna meningkatkan kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Temanggung dimasa mendatang antara lain:

- a. Meningkatkan Advokasi dan KIE baik kepada tokoh masyarakat dan lintas sektoral tentang program KKBPK (Kependudukan Keluarga Berencana Pembangunan Keluarga) dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak/PPPA, sampai lini lapangan dan memanfaatkan media sosial, baik cetak maupun elektronik

- b. Mengoptimalkan Kinerja Penyuluh KB dan Peran serta IMP (Institusi Masyarakat Pedesaan) dan POKTAN (kelompok kegiatan), dalam rangka mencapai sasaran strategis tersebut
- c. Pengoptimalkan aplikasi Sepesan Perak dalam pelayanan dan pendampingan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.
- d. Peningkatan jejaring dalam penanganan kasus
- e. Usulan pembetulan UPT PPPA.

Demikian laporan akuntabilitas kinerja Instansi pemerintah Tahun 2023 untuk SKPD DPPAPPKB Kabupaten Temanggung semoga dapat menjadi bahan pertimbangan/evaluasi untuk kegiatan/kinerja yang akan datang

Sekian dan terima kasih.

Temanggung, Februari 2024



Dra. GEMA ARTISTI WAHYUDI, M.M.

Pembina TK I

NIP. 19700730 199001 2 002



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Jln Jendral Sudirman No 130 dan 132 Temanggung Kode Pos 56218 Telp/Faximil (0293) 491059
Fax 492182 Kode Pos 56218

Surat elektronik dpppappkb@temanggungkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini

Nama . KHABIB MUALIM, SKM, M Kes, MM

Jabatan SEKRETARIS DPPPAPPKB KAB TMG

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama Dra SRI ENDANG PRAPTANINGSIH, M Si

Jabatan KEPALA DPPPAPPKB Kabupaten Temanggung

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya di sebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami

Pihak kedua akan melakukan supervise yang di perlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dan perjanjian ini dan mengambil tindakan yang di perlukan dalam rangka penghargaan dan sanksi



Pihak Kedua,
KEPALA DPPPAPPKB

Dra. SRI ENDANG PRAPTANINGSIH, M Si

Pembina tingkat I

NIP 19660712 199403 2 006

Temanggung, Januari 2023

Pihak Pertama,
SEKRETARIS DPPPAPPKB

KHABIB MUALIM, SKM, M Kes, MM

Pembina Tingkat I

NIP 19680425 198802 1 001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
PERANGKAT DAERAH DPPAPPKB
JABATAN SEKRETARIS DPPAPPKB KABUPATEN TEMANGGUNG**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terlaksananya urusan penunjang Pemerintah Daerah	Cakupan urusan Penunjang Pemerintah Daerah	100%
NO	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN	3 236 788 745,00	PAD
2	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	64 200 000,00	DAK Non Fisik BOKB-KB
3	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	46 000 000,00	DAK Non Fisik BOKB-KB
4	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	1 516 035 000,00	DAK Fisik Bidang Kesehatan dan KB -Reguler KB
JUMLAH		4 863 023 745,00	

Temanggung, 3 Januari 2023
Pihak Kedua
KEPALA DPPAPPKB KAB TMG


Dra. SRI ENDANG PRAPTANINGSIH, M.Si
Pembina Tk I
NIP. 19660712 199403 2 006

Pihak Pertama
SEKRETARIS DPPAPPKB KAB TMG


KHABIB MUALIM, SKM, Mkes, MM
Pembina Tingkat I
NIP. 19680425 198802 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Jln Jendral Sudirman No 130 dan 132 Temanggung Kode Pos 56218 Telp/Fax: (0293) 491059
Fax 492182 Kode Pos 56218
Surat elektronik dpppappkb@temanggungkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini

Nama Dra TITIK SUPRAPTI,MAP

Jabatan KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama KHABIB MUALIM,SKM,MKes,MM

Jabatan SEKRETARIS DPPPAPPKB KAB TMG

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya di sebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang di perlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dan perjanjian ini dan mengambil tindakan yang di perlukan dalam rangka penghargaan dan sanksi

Temanggung, Januari 2023

Pihak Kedua,

SEKRETARIS DPPPAPPKB

KHABIB MUALIM,SKM,MKes,MM

Pembina Tk I

NIP 19680425 198802 1 001

Pihak Pertama,

KASUBBAG UMPEG

Dra TITIK SUPRAPTI,MAP

Pembina

NIP 19660830 199403 2 003

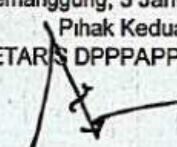
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
PERANGKAT DAERAH DPPPAPKB
JABATAN KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN

NO	SASARAN STRATEGI	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET
1	Terlaksannnya kebutuhan Rutin penunjang urusan Pemanntah Daerah	Tersedianya komponen instalasi listnk/penerangan bangunan kantor	12 bulan
		Tersediannya kebutuhan alat tulis kantor	12 bulan
2	Tersedianya data pegawai dan data aset	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	12 bulan
		Tersediannya makanan dan minuman karyawan dan tamu	12 bulan
		Tersedianya kegiatan koordinasi dan konsultasi di luar daerah	12 bulan
		Tersedianya kegiatan koordinasi dan konsultasi di dalam daerah	12 bulan
		Terbayarnya biaya telpon, internet, air dan listrik kantor Gedung Bappeda	12 bulan
		Terpeliharanya peralatan perlengkapan gedung kantor agar tetap dalam kondisi baik	12 bulan
		Tersedianya pembayaran honor tenaga non PNS, lembur PNS dan Non PNS, jasa pengaman satpam/penjaga malam, tenaga kebersihan dan belanja transaksi keuangan	12 bulan
		Terpeliharanya kendaraan dinas agar tetap dalam kondisi baik	12 bulan
		Terpeliharanya gedung kantor agar tetap dalam kondisi baik	12 bulan
		Terpenuhinya data dan pelayanan pegawai dan data aset	12 bulan
NO	KEGIATAN		RETERANGAN
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2 000 000,00	DAU
2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	11 000 000,00	DAU
3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	9 820 000,00	DAU
4	Fasilitasi Kunjungan Tamu	29 030 000,00	
5	Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	25 750 000,00	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		DAU
6	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 000 000,00	DAU
7	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	39 100 000,00	DAU
8	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10 000 000,00	DAU

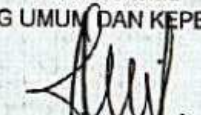
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		DAU
10	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas	15 000 000,00	DAU
11	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	40 000 000,00	DAU
12	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	25 000 000,00	DAU
13	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	5 000 000,00	DAU
	Jumlah	223 700 000,00	

Temanggung, 3 Januari 2023

Pihak Kedua
SEKRETARIS DPPPAPPKB KAB TMG


KHABIB MUALIM SKM, M Kes, MM
Pembina Tingkat I
NIP 19680425 198802 1 001

Pihak Pertama
KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN


Dra TITIK SUPRIATI, MAP
NIP 196608301994032003



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Jln Jendral Sudirman No 130 dan 132 Temanggung Kode Pos 56218 Telp/Faximil (0293) 491059
Fax 492182 Kode Pos 56218
Surat elektronik dpppappkb@temanggungkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini


Nama Dra PURWANINGSIH
Jabatan KASUBBAG PERENCANAAN DAN KEUANGAN
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama KHABIB MUALIM, SKM, MKes, MM
Jabatan SEKRETARIS DPPPAPPKB KAB TMG
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya di sebut pihak kedua


Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami

Pihak kedua akan melakukan supervise yang di perlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang di perlukan dalam rangka penghargaan dan sanksi

Pihak Kedua,
SEKRETARIS DPPPAPPKB


KHABIB MUALIM, SKM, MKes, MM
Pembina Tk I
NIP 19680425 198802 1 001


Temanggung, Januari 2023
Pihak Pertama,
KASUBBAG RENKEU


Dra PURWANINGSIH
Penata TK I
NIP 19680923 199402 2 001


**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
PERANGKAT DAERAH DPPPAPPKB
JABATAN KASUBBAG PERENCANAAN DAN KEUANGAN**

NO	SASARAN STRATEGI	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET
1	Meningkatnya Managemen dan Tata Kelola Perangkat Daerah yang Akuntabel dan Profesional	Terlaksananya penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan PD	27 Dokumen
2		Terbayarnya gaji dan tunjangan PNS	14 bulan
NO	KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1	Menyusun Renstra dan Renja Perangkat Daerah		
2	Menyusun Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan		
4	Menyusun dokumen pelaporan capaian kinerja		
3	Menyediakan Gaji dan Tunjangan ASN	3 236 788 745	14 bulan
Jumlah		3 236 788 745,00	

Temanggung, Desember 2022
Pihak Kedua
SEKRETARIS DPPPAPPKB KAB TMG


KHABIB MUALIM, SKM, M Kes, MM
Pembina Tingkat I
NIP 19680425 198802 1 001

Pihak Pertama
KASUBBAG PERENCANAAN DAN KEUANGAN


Dra PURWANINGSIH
NIP 19680923 199402 2 001



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Jln Jendral Sudirman No 130 dan 132 Temanggung Kode Pos 56218 Telp/Faximil (0293) 491059
Fax 492182 Kode Pos 56218

Surat elektronik dpppappkb@temanggungkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini

Nama TRI AGUS SUTOPO, SH

Jabatan KABID PENGELOLAAN PELAYANAN DAN PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama Dra SRI ENDANG PRAPTANINGSIH, M Si

Jabatan KEPALA DPPPAPPKB KAB TMG

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya di sebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami

Pihak kedua akan melakukan supervise yang di perlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang di perlukan dalam rangka penghargaan dan sanksi

Pihak Kedua,
KEPALA DPPPAPPKB

Dra SRI ENDANG PRAPTANINGSIH, M Si
Pembina Tk I
NIP 19660712 199403 2 006

Temanggung, Januari 2023
Pihak Pertama,
KABID PENGELOLAAN PELAYANAN
DAN PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA

TRI AGUS SUTOPO, SH
Pembina
NIP 19670430 199205 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
PERANGKAT DAERAH DPPPAPKB
JABATAN KABID PENGOLAHAN PELAYANAN DAN PEMBINAAN KELUARGA SEJAHTERA

NO	SASARAN STRATEGI	INDIKATOR PROGRAM	TARGET
1	2	3	4
1	Terkendalinya laju pertumbuhan penduduk	Prosentase PUS yang memiliki pengetahuan dan Pemahaman tentang semua jenis metode Kontrasepsi Modern	76,21%
		Angka Pemakaian Kontrasepsi (Contraceptive Prevalense Rate / CPR) suatu cara (All methode) pada perempuan usia 15 s d 49 tahun	79,84%
		Prosentase Kepesertaan KB Aktif	76,21%
		Prosentase Keberhasilan Pemakaian Metode Kontrasepsi Jangka Panjang	49,19%
		Prosentase kampung KB yang memenuhi IDM (Indeks Desa Membangun)	33,90%
NO	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal		
	Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	150 000 000,00	DAK Non Fisik BOKB-KB
	Pengendalian Program KKBPK	80000000	
2	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber- KB		DAK Non Fisik BOKB-KB
	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	9 000 000,00	DAK Non Fisik BOKB-KB
	Jumlah	239 000 000,00	

Temanggung, 3 Januari 2023

Pihak Kedua

KEPALA DPPPAPKB

KABUPATEN TEMANGGUNG


 Dra. SRI ENDANG PRAPTANINGSIH, M Si

Pembina Tk I

NIP 19660712 199403 2 006

Pihak Pertama
 KABID PENGELOLAAN
 PELAYANAN DAN PEMBINAAN
 KELUARGA BERENCANA


 TRI AGUS SUTOPO, SH

NIP 19681023 199401 2 002



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Jln Jendral Sudirman No 130 dan 132 Temanggung Kode Pos 56218 Telp/Faximil (0293) 491059
Fax. 492182 Kode Pos 56218

Surat elektronik dpppappkb@temanggungkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini

Nama NUROHMAD,S Ag,MM

Jabatan KABID DALDUK DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama Dra SRI ENDANG PRAPTANINGSIH,M Si

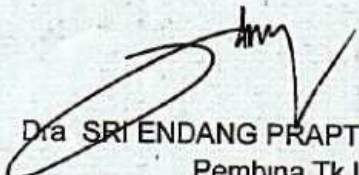
Jabatan KEPALA DPPAPPKB KAB TMG

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya di sebut pihak kedua

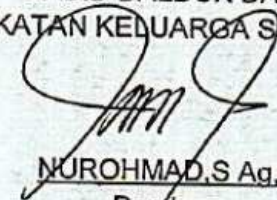
Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang di perlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang di perlukan dalam rangka penghargaan dan sanksi

Pihak Kedua,
KEPALA DPPAPPKB


Dra SRI ENDANG PRAPTANINGSIH,M Si
Pembina Tk I
NIP 19660712 199403 2 006

Temanggung, Januari 2023
Pihak Pertama,
KABID DALDUK DAN
PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA


NUROHMAD,S Ag,MM
Pembina
NIP 19731210 200312 1 004

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
PERANGKAT DAERAH DPPPAPPKB
JABATAN KABID KETAHANAN KELUARGA DAN KELUARGA SEJAHTERA

NO	SASARAN STRATEGI	INDIKATOR PROGRAM	TARGET
1	Terkendalinya laju pertumbuhan penduduk	Prosentase Penyediaan Data Mikro Keluarga di Desa/Kelurahan	100%
		Prosentase Pasangan Usia Subur yang ingin KB tidak terpenuhi/unmetneed	9,17%
		Prosentase pasangan usia subur yang istrinya di bawah 20 tahun	2,04%
		angka kelahiran remaja usia 15 - 19 tahun (ASRF 15 - 19 tahun)	26,30%
		Indek Pembangunan Keluarga	50,00%
NO	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1	Program Pengendalian Penduduk		
	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK)	50 000 000,00	PAD
2	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal		
	Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	145 000 000,00	DAK Fisik bidang Kesehatan dan dan KB reguler_KB
3	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga		
	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	360 000 000,00	DAK Fisik Bidang Kesehatan dan KB -Reguler KB
	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	3 855 900 000,00	DAK Non Fisik BOKB-KB

Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	50 000 000,00	PAD
Jumlah	4 460 900 000	

Temanggung, 3 Januari 2023

Pihak Kedua
KEPALA DPPPAPPKB KABUPATEN
TEMANGGUNG


Dra. SRI ENDANG PRAPTANINGSIH, M Si.
Pembina Tk I
NIP 19660712 199403 2 006

Pihak Pertama
KABID KETAHANAN
KELUARGA DAN KELUARGA
SEJAHTERA


NUROHMAD, S Ag, MM
NIP 19731210 200312 1 004



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Jln Jendral Sudirman No 130 dan 132 Temanggung Kode Pos 56218 Telp/Faximil (0293) 491059

Fax 492182 Kode Pos 56218

Surat elektronik dpppappkb@temanggungkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini

Nama DARMAYANI, DMN, MSi

Jabatan KABID PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama Dra SRI ENDANG PRAPTANINGSIH, M Si

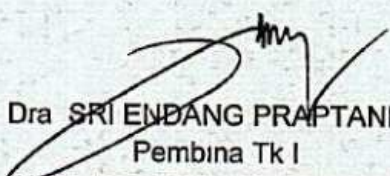
Jabatan KEPALA DPPKBPPPA KAB TMG

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya di sebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang di perlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang di perlukan dalam rangka penghargaan dan sanksi

Pihak Kedua,
KEPALA DPPPAPPKB


Dra SRI ENDANG PRAPTANINGSIH, M Si
Pembina Tk I
NIP 19660712 199403 2 006

Temanggung, Januari 2023
Pihak Pertama,
KABID PP DAN PA



DARMAYANI DMN, M Si
Pembina
NIP 19650108 198903 2 008

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
PERANGKAT DAERAH DPPPAPKB
JABATAN KASI PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN

NO	SASARAN STRATEGI	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET
1	Meningkatnya Pengarusutamaan Gender serta Perlindungan terhadap Perempuan dan Anak	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	95,65
NO	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN	KEJERANGAN
1	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	30 000 000,00	DAU
2	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	40 000 000,00	DAU
3	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	15 000 000,00	DAU
5	Program Perlindungan Khusus Hak Anak	25 000 000,00	DAU
Jumlah		110 000 000	

Temanggung, 3 Januari 2023

Pihak Kedua
 KEPALA DPPPAPKB
 KABUPATEN TEMANGGUNG


Dra. SRI ENDANG PRAPTANINGSIH, M.Si
 Pembina Tk I
 NIP. 19660712 199403 2 006

Pihak Pertama
 KABID PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
 DAN PERLINDUNGAN ANAK


DARMAYANI DMN, M.Si
 NIP. 19650108 198903 2 008



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Jln Jendral Sudirman No 130 dan 132 Temanggung Kode Pos 56218 Telp/Faximil (0293) 491059
Fax. 492182 Kode Pos 56218

Surat elektronik dpppappkb@temanggungkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini

Nama Dra SUDIYATI WAHYUNINGSIH
Jabatan PENATA KEPENDUDUKAN DAN KB MUDA

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama TRI AGUS SUTOPO, SH
Jabatan KABID PENGELOLAAN PELAYANAN DAN PEMBINAAN KB


Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya di sebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami

Pihak kedua akan melakukan supervise yang di perlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dan perjanjian ini dan mengambil tindakan yang di perlukan dalam rangka penghargaan dan saksi

Temanggung, Januari 2023

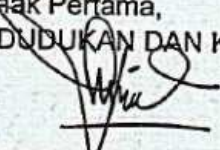
Pihak Kedua,
KABID PENGELOLAAN PELAYANAN
DAN PEMBINAAN KB


TRI AGUS SUTOPO, SH

Pembina

NIP 19670430 199205 1 001

Pihak Pertama,
PENATA KEPENDUDUKAN DAN KB MUDA


Dra SUDIYATI WAHYUNINGSIH

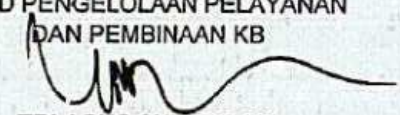
Penata TK I

NIP 19671204 199203 2 004

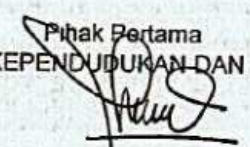
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
PERANGKAT DAERAH DPPAPPKB
JABATAN PENATA KEPENDUDUKAN DAN KB MUDA

NO	SASARAN STRATEGI	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET
1		Jumlah PUS yang ingin anak ditunda atau tidak ingin anak lagi dan tidak menggunakan alat kontrasepsi	9,17%
		Prosentase Kepesertaan KB Baru	100%
		Prosentase Keberhasilan Pemakaian Metode Kontrasepsi Jangka Panjang	49,19%
		jumlah PUS <20 th	2,04%
		jumlah wanita usia 15-19 th	26,30%
		jumlah PUS yang tahu dan memahami alokon modern	76,21%
NO	KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota		
	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	27 900 000,00	DAK Non Fisik BOKB-KB
	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	1 994 982 000,00	PAD dan DAK Non Fisik BOKB-KB
	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	17 100 000,00	DAK Non Fisik BOKB-KB
	jumlah	2 039 982 000,00	

Temanggung, 3 Januari 2023
Pihak Kedua
**KABID PENGELOLAAN PELAYANAN
DAN PEMBINAAN KB**


TRI AGUS SUTOPO, SH
NIP. 19670430 199205 1 001

Pihak Pertama
PENATA KEPENDUDUKAN DAN KB MUDA


Dra. SUDIYATI WAHYUNINGSIH
NIP. 19671204 199203 2 004



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Jln Jendral Sudirman No 130 dan 132 Temanggung Kode Pos 56218 Telp/Faximil (0293) 491059

Fax. 492182 Kode Pos 56218

Surat elektronik dpppappkb@temanggungkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini

Nama KUSAENI WIDODO YUNianto, SH

Jabatan PENATA KEPENDUDUKAN DAN KB MUDA

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama TRI AGUS SUTOPO, SH

Jabatan KABID PENGELOLAAN PELAYANAN DAN PEMBINAAN KB

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya di sebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami

Pihak kedua akan melakukan supervise yang di perlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang di perlukan dalam rangka penghargaan dan sanksi

Pihak Kedua,
KABID PENGELOLAAN PELAYANAN
DAN PEMBINAAN KELURA BERENCANA

TRI AGUS SUTOPO, SH
Pembina

NIP 19670430 199205 1 001

Temanggung, Januari 2023
Pihak Pertama,
PENATA KEPENDUDUKAN DAN KB MUDA

KUSAENI WIDODO YUNianto, SH
Penata Tk I

NIP 19760609 200801 1 007


**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
PERANGKAT DAERAH DPPPAPKB
JABATAN PENATA KEPENDUDUKAN DAN KB MUDA**

NO	SASARAN STRATEGI	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET
1	2	3	4
1	Terkendalinya Laju Pertumbuhan Penduduk	Terlaksananya advokasi dan KIE kepada masyarakat	100%
		Prosentase kampung KB yang memenuhi IDM (Indeks Desa Membangun)	33,90%

NO	KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)		
	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	578 000 000,00	DAK Non Fisik BOKB-KB
	jumlah	578 000 000,00	

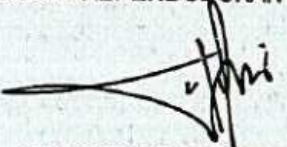
Temanggung, 3 Januari 2023
Pihak Kedua

KABID PENGELOLAAN PELAYANAN
DAN PEMBINAAN KB


TRI AGUS SUTOPO, SH
NIP. 19670430 199205 1 001

Pihak Pertama

PENATA KEPENDUDUKAN DAN KB MUDA


KUSAENI WIDODO YUNIANTO, SH
NIP. 19681023 199401 2 002



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Jln Jendral Sudirman No 130 dan 132 Temanggung Kode Pos 56218 Telp/Faxmil (0293) 491059
Fax 492182 Kode Pos 56218

Surat elektronik dpppappkb@temanggungkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini

Nama Dra MIRA HARSWI,
Jabatan PENATA KEPENDUDUKAN DAN KB MUDA
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama NUROHMAD, S Ag, MM
Jabatan KABID PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya di sebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami

Pihak kedua akan melakukan supervise yang di perlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dan perjanjian ini dan mengambil tindakan yang di perlukan dalam rangka penghargaan dan sanksi

Temanggung, Januari 2023
Pihak Kedua, Pihak Pertama,
KABID PENGENDALIAN PENDUDUK PENATA KEPENDUDUKAN DAN KB MUDA
DEAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA

NUROHMAD, S Ag, MM
Pembina
NIP 19731210 200312 1 004


Dra MIRA HARSWI
Penata Tk I
NIP 19670926 199302 2 00


**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
PERANGKAT DAERAH DPPPAPPKB
JABATAN PENATA KEPENDUDUKAN DAN KB MUDA**

NO	SASARAN STRATEGI	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET
1	Terkendalinya laju pertumbuhan penduduk	Terlaksananya orientasi dan pelatihan teknik pengelola ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R, dan pemberdayaan ekonomi keluarga	20 Kelompok
NO	KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal		
a	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minil	260 000 000,00	DAK Non Fisik BOKB-KB
2	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Masyarakat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB		
a	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	1 007 500 000,00	PAD
	Jumlah	1 267 500 000,00	

Temanggung, 3 Januari 2023
Pihak Kedua
KABID PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA

NUROHMAD, S Ag, MM
NIP. 19731210 200312 1 004

Pihak Pertama
PENATA KEPENDUDUKAN DAN KB MUDA


Dra MIRA HARSIVI
NIP. 19670926 199302 2 002



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Jln Jendral Sudirman No 130 dan 132 Temanggung Kode Pos 56218 Telp/Faxmil (0293) 491059
Fax 492182 Kode Pos 56218

Surat elektronik dpppappkb@temanggungkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini

Nama ETY PRASETYOWATI, S H

Jabatan PENATA KEPENDUDUKAN DAN KB MUDA

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama NUROHMAD, S Ag, MM

Jabatan KABID PENGENDALIAN PENDUDUK DAN PENINGKATAN KS

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya di sebut pihak kedua

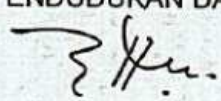
Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami

Pihak kedua akan melakukan supervise yang di perlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang di perlukan dalam rangka penghargaan dan saksi

Pihak Kedua,
KABID DALDUK DAN PENINGKATAN KS

NUROHMAD, S Ag, MM
Pembina
NIP 19731210 200312 1 004

Temanggung, Januari 2023
Pihak Pertama,
PENATA KEPENDUDUKAN DAN KB MUDA


ETY PRASETYOWATI, S H
Penata TK I
NIP 19681023 199401 2 002

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023
PERANGKAT DAERAH DPPPAPPKB
JABATAN PENATA KEPENDUDUKAN DAN KB MUDA**

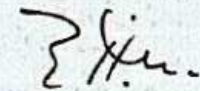
NO	SASARAN STRATEGI	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET
1	2	3	4
1	Terkendalinya laju pertumbuhan penduduk	Prosentase Penyediaan Data Mikro Keluarga di Desa/Kelurahan	100%
		Tersusunnya Raperda Grand Design Pembangunan Keluarga GDPK	100%
		Terlaksananya kegiatan operasional program KKBPK melalui rapat koordinasi	100%
		Terlaksannnya pengolahan dan Pelaporan data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	12 bulan

NO	KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		
a	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	205 800 000,00	DAK Non Fisik BOKB-KB
c	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	96 000 000,00	PAD dan DAK Non Fisik BOKB-KB
	Jumlah	301 800 000,00	

Temanggung, 3 Januari 2023
Pihak Kedua
KABID PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA

NUROHMAD,S Ag,MM
NIP 19731210 200312 1 004

Pihak Pertama
PENATA KEPENDUDUKAN DAN KB MUDA


ETY PRASETYOWATI, S.H
NIP 19681023 199401 2 002



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Jln Jendral Sudirman No 130 dan 132 Temanggung Kode Pos 56218 Telp/Faximil (0293) 491059
Fax. 492182 Kode Pos 56218

Surat elektronik dpappkb@temanggungkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini

Nama RORO RITA SAPTAWATI, SH, MM

Jabatan ANALIS KEBIJAKAN MUDA

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama DARMAYANI DMN, M Si

Jabatan KABID PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya di sebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami

Pihak kedua akan melakukan supervise yang di perlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang di perlukan dalam rangka penghargaan dan sanksi

Temanggung, Januari 2023

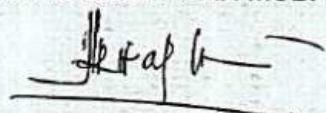
Pihak Kedua,
KABID PP DAN PA


DARMAYANI DMN, M Si

Pembina

NIP 19650108 198903 2 008

Pihak Pertama,
ANALIS KEBIJAKAN MUDA


RORO RITA SAPTAWATI, SH, MM

Pembina

NIP 19670923 198703 2 004

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
PERANGKAT DAERAH DPPPAPPKB
JABATAN ANALIS KEBIJAKAN MUDA**

NO	SASARAN STRATEGI	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya Pengarusutamaan Gender serta Perlindungan terhadap Perempuan dan Anak	Prevalensi Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak	0,11%
		Prosentase Perempuan dan Anak Korban Kekerasan	0,11%
		presentase keterwakilan perempuan di lembaga pemerintah	2,34%

NO	KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		
	Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	10 000 000,00	PAD
2	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota		
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	15 000 000,00	PAD
3	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota		

Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	25 000 000	PAD
Jumlah	50 000 000	

Temanggung, 3 Januari 2023
Pihak Kedua
KABID PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK

DARMAYANI DMN, M Si
NIP 19650108 198903 2 003

Pihak Pertama
ANALIS KEBIJAKAN MUDA

RORO RITA SAPTAWATI, SH, MM
NIP 19670923 198703 2 004



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Jln Jendral Sudirman No 130 dan 132 Temanggung Kode Pos 56218 Telp/Faximil (0293) 491059
Fax 492182 Kode Pos 56218

Surat elektronik dpppappkb@temanggungkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini

Nama Dra SAPTO RURUH S

Jabatan ANALIS KEBIJAKAN MUDA

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama DARMAYANI DMN, M Si


Jabatan KABID PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya di sebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami

Pihak kedua akan melakukan supervise yang di perlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang di perlukan dalam rangka penghargaan dan sanksi

Pihak Kedua,
KABID PP DAN PA


DARMAYANI DMN, M Si

Pembina

NIP 19650108 1989032008

Temanggung, Januari 2023

Pihak Pertama,
ANALIS KEBIJAKAN MUDA


Dra SAPTO RURUH S

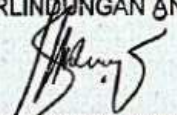
Pembina

NIP 19680407 200012 2 003

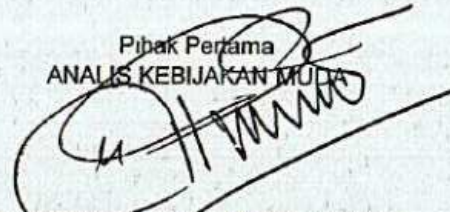
**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
PERANGKAT DAERAH DPPPAPKB
JABATAN ANALIS KEBIJAKAN MUDA**

NO	SASARAN STRATEGI	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET
1	Meningkatnya Pengarusutamaan Gender serta Perlindungan terhadap Perempuan dan Anak	Persentase terbentuknya kecamatan layak anak	60,00%
		Persentase anak korban kekerasan	0,11%
NO	KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota		
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	30 000 000,00	PAD
2	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota		
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	30 000 000,00	PAD
3	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak anak yang wilayah kerjanya dalam Daerah /Kabupaten		
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	30 000 000,00	PAD
Jumlah		90 000 000	

Temanggung, 3 Januari 2023
Pihak Kedua
KABID PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK


DARMAYANI DMN, M Si
NIP. 19650108 198903 2 003

Pihak Pertama
ANALIS KEBIJAKAN MUDA


Dra SAPTO RURUH SULISTYOWARNI
NIP. 19680407 200012 2 003

Rencana Aksi DPPAPPKB Kabupaten Temanggung Tahun 2024

NO	SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN (MELIHAT DPA)				PROGRAM dan KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET KEGIATAN	RENCANA AKSI	ANGGARAN(Rp)	PENANGGUNGJAWA B	JADWAL KEGIATAN												KETERANGAN					
		3										5	6	7	8	9	I			II			III			IV			
		I	II	III	IV												1	2	3	4	5	6	7		8	9	10	11	12
						PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH																							
						Administrasi keuangan Perangkat Daerah																							
1		23%	31%	23%	23%	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	14	1. gaji ASN 2. Tunjangan ASN / TPP	3.615.772.671	1. Kasubag umum dan kepegawaian																DAU		
						Administrasi Umum Perangkat Daerah																							
2		35%	25%	17%	23%	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12	1. Pengeluaran kebutuhan rutin	3.000.000	1. Kasubag umum dan kepegawaian																DAU		
3		20%	27%	27%	26%	Penyediaan bahan logistik Kantor	Tersedianya bahan logistik Kantor	12	1. Pengeluaran kebutuhan rutin	11.000.000	1. Kasubag umum dan kepegawaian																DAU		
4		19%	33%	20%	28%	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	12	1. Foto Copy. 2. Cetak.	7.000.000	1. Kasubag umum dan kepegawaian																DAU		
5		26%	25%	26%	24%	fasilitasi kunjungan tamu	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	12	1. minum ASN 2. minum dan snack tamu	13.000.000	1. Kasubag umum dan kepegawaian																DAU		

6		20%	30%	30%	20%	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	1. Perjalanan Dinas ke Antar propinsi. 2. Perjalanan dinas ke Pusat. 3. Perjalanan dinas antar kabupaten/Kota.	30.000.000	1. Kasubag umum dan kepegawaian									DAU
						Penyediaan jasa Penunjang Urusan Perangkat Daerah														
7		19%	25%	28%	28%	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	1. Perjalanan Dinas 20 kecamatan. 2. Perjalanan dinas ke Puskesmas di kabupaten Temanggung.	8.000.000	1. Kasubag umum dan kepegawaian									DAU
8		25%	25%	25%	25%	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12	1. Pengeluaran kebutuhan rutin	35.000.000	1. Kasubag umum dan kepegawaian									DAU
9		16%	60%	11%	13%	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianyan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12	jasa service perlengkapan kantor	7.000.000	1. Kasubag umum dan kepegawaian									DAU
10		25%	29%	22%	24%	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	12	1. alat kebersihan kantor 2. Gaji untuk SS , penjaga malam dan satpam 3.uang lembur ASN	793.368.000	1. Kasubag umum dan kepegawaian									DAU
						Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah														
11		20%	33%	23%	23%	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	12	1. Pembelian Komponen Listrik	15.000.000	1. Kasubag umum dan kepegawaian									DAU

				Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota																			
16		12%	42 %	23%	22 %	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	4 Kegiatan	1. Rapat kerja Dharma Wanita 2. Rapat pengurus Dharma Wanita 3. Sosialisasi E-Reporting 4. Penyediaan makan minum rapat & sosialisasi 5. Biaya penunjang kegiatan rapat & sosialisasi	25.000.000	Kabid PPPA											DAU	
		PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN																					
		Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota																					
17		17%	23 %	23%	38 %	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Tersedianya Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi			75.000.000	Kabid PPPA												DAU
		PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA																					
		Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																					
18		83%	8%	8%	0%	Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Tersedianya Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	7 Kegiatan		10.000.000	Kabid PPPA												DAU

21		1%	29%	70%	0%	Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	Terlaksananya advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA			20.000.000	Kabid PPPA									DAU	
Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																					
22		15%	31%	39%	15%	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			75.000.000	Kabid PPPA									DAU	
	Pertumbuhan Penduduk yang terkendali					PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK															
						Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota															
23		25%	25%	45%	5%	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Terlaksananya Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	12		217.800.000	Kabid Dalduk PPPKS										DAK
24		26%	39%	25%	10%	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Terlaksananya Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	12		205.456.000	Kabid Dalduk PPPKS										DAK
						PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)															
						Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal															

25		2%	45 %	9%	45 %	Pengendalian Program KKBPB	Terlaksananya Pengendalian Program KKBPB			80.000.000	Kabid Dalduk PPPKS																											DAK
26		27%	27 %	28%	18 %	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana	Terkelolanya Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)			1.055.144.000	Kabid Dalduk PPPKS																											DAK
27		17%	33 %	34%	16 %	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Terlaksananya Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)			300.000.000	Kabid Dalduk PPPKS																											DAK

28		12%	53 %	23%	13 %	Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Terlaksananya Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	1	1. Penyusunan Perjanjian Kerjasama dengan Media Elektronik (TV dan Radio) 2. Penayangan KIE melalui media elektronik. 3. Pembuatan media cetak beserta pemasangannya	71.825.000	Kabid PPPKB											DAU DAN DAK	
29		9%	33 %	48%	10 %	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal	Terlaksananya Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Sesuai Kearifan Budaya Lokal			83.650.000	Kabid PPPKB												DAK
30		16%	46 %	20%	18 %	Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Terlaksananya Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja			200.000.000	Kabid Dalduk PPPKS												DAK
Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)																							

31		20%	30%	50%	0%	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Terlaksananya Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	4		821.525.000	Kabid PPPKB							DAK
32		0%	26%	73%	3%	Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)				1.399.956.000	Kabid PPPKB							DAK FISIK
		Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota																
33		25%	26%	26%	23%	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Terlaksananya Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	1. Dropping Rutin Alkon ke Faskes	1. Dropping Rutin Alkon ke Faskes 24 PUSKESMAS,4 RUMKIT dan 3 Klinik Kb	30.000.000	Kabid PPPKB							DAK
34		14%	34%	29%	24%	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Terwujudnya Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)			2.075.434.000	Kabid PPPKB							DAK

35		0%	10 0%	0%	0%	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Tersedianya Sarana Penunjang Pelayanan KB			362.000.000	Kabid Dalduk PPPKS									DAK FISIK
36		40%	10 %	30%	20 %	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Terlaksananya Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	2	1.Pembinaan pelayanan keluarga Berencanaan dan kesehatan Reproduksi di fasilitas kesehatan termasuk jaringan dan jejaringnya	35.000.000	Kabid PPPKB									DAK
Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Masyarakat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB																				
37		0%	50 %	50%	0%	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Terintegrasinya Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	3		5.314.000	Kabid PPPKB									DAK
38		12%	39 %	42%	7%	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	Terwujudnya Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Kampung Keluarga Berkualitas			774.036.000	Kabid PPPKB									DAK
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)																				
Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga																				

39		10%	34 %	34%	13 %	Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	Terlaksananya Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)			19.200.000	Kabid Dalduk PPPKS											DAK
40		21%	57 %	22%	0%	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	Terlaksananya Promosi dan Sosialisasi Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)			17.500.000	Kabid Dalduk PPPKS											DAU
41		0%	99 %	1%	0%	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	Terlaksananya Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga(BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	3keg		300.000.000	Kabid Dalduk PPPKS											DAK

42		34%	22 %	23%	12 %	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Tersedianya biaya operasional bagi kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	12	operasional pendampingan keluarga	3.836.700.000	Kabid Dalduk PPPKS											DAK
Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga																						
43		9%	26 %	65%	0%	Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Terlaksananya Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)			100.000.000	Kabid Dalduk PPPKS											DAU

RENCANA KINERJA TAHUNAN
DPPPAPPKB

Tahun : 2025

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatkan keadilan dan kesejahteraan Gender	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	10,22
2	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	0,6

Temanggung, Februari 2024
KEPALA DPPPAPPKB

Dra. GEMA ARTISTI WAHYUDI, M.M
Pembina Tingkat I
NIP. 19700730 199001 2 002

Pohon Kinerja DPPAPPKB Kabupaten Temanggung

- Visi : Menuju Masyarakat Temanggung Yang Tentrem, Marem, Gandem
- Misi : Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas, Berkarakter Dan Berdaya
- Tujuan : Terwujudnya sumber daya manusia Yang Berkualitas, Berkarakter Dan Berdaya

➤ **Sasaran 1 : Meningkatkan Pengarustamaan Gender**

- Program Pengarustamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
 - ❖ Presentase keterwakilan perempuan di lembaga pemerintah
 - ❖ Rasio Perangkat daerah yang menerapkan kebijakan responsif gender dalam penyusunan dokumen perencanaan
 - Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota
 - Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG
 - Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota
 - Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota
- Program Perlindungan Perempuan
 - ❖ Prevalensi kasus kekerasan terhadap anak Perempuan
 - ❖ persentase perempuan korban kekerasan
- Program peningkatan kualitas keluarga
 - ❖ Persentase desa sayang ibu dan bayi
 - ❖ Persentasre rumah sakit sayang ibu dan bayi
 - Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 - Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota
 - Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota

- Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 - Program Pemenuhan Hak Anak /PHA
 - ❖ Persentase terbentuknya kecamatan layak anak
 - Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
 - Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
 - Program perlindungan khusus anak
 - ❖ Persentase anak korban kekerasan
 - Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
 - Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
- **Sasaran 2 : Mengendalikan laju pertumbuhan penduduk**
- Program pengendalian penduduk dan informasi keluarga
 - ❖ Persentase Penyediaan Data Mikro Keluarga di Desa/ Kelurahan
 - ❖ Persentase pasangan usia subur yang ingin ber-KB tidak terpenuhi/unmetneed
 - ❖ Presentase pasangan usia subur yang istrinya dibawah usia 20 tahun
 - ❖ Angka kelahiran remaja usia 15-19 th (ASFR 15-19th)
 - Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Dalam Rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk
 - Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota
 - Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
 - Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga
 - Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga
 - Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB
 - Program Pembinaan Keluarga Berencana /KB
 - ❖ Persentase PUS yang memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang semua jenis metode kontrasepsi modern
 - ❖ Persentase kepesertaan KB aktif

- ❖ Persentase keberhasilan pemakaian metode kontrasepsi jangka Panjang
- ❖ Persentase kampung KB yang memenuhi Indeks Desa Membangun (IDM)
 - Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal
 - Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja
 - Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang
 - Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)
 - Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK
 - Pengendalian Program KKBPK
 - Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)
 - Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB
 - Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)
 - Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi Serta Pelaksanaan Pelayanan KB Di Daerah Kabupaten/Kota
 - Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya
 - Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)
 - Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB
 - Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya
 - Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB
 - Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB
 - Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB
- Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)

- ❖ **Indek Pembangunan Keluarga**
 - Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
 - Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)
 - Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)
 - Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas
 - Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
 - Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS).

FOTO KEGIATAN

Penghargaan kategori Pelayanan Ramah Anak di Puskesmas Terstandarisasi dan Sebagai Rujukan Nasional Tahun 2022

Jumat, 20 Januari 2023



Puskesmas Temanggung mendapat Penghargaan kategori Pelayanan Ramah Anak di Puskesmas Terstandarisasi dan Sebagai Rujukan Nasional Tahun 2022, Penghargaan diserahkan oleh Kepala DPPAPPKB Provinsi Jawa Tengah Dra. Retno Sudewi, Apt, M.Si., MM, pada hari Jumat, 20 Januari 2023, hadir menerima penghargaan adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung, Dokter Intan Pandan wangi B, Kepala DPPAPPKB Kabupaten Temanggung Dra. Sri Endang Praptaningsih, M.Si. Kepala Puskesmas Kecamatan Temanggung Dr. Anastasia Susilo Handayani, Kepala Bidang PPPA DPPAPPKB Kabupaten Temanggung Darmayani, DMN, M.Si. Dalam sambutannya Kepala DPPAPPKB Provinsi Jawa Tengah menyampaikan apresiasi kepada Puskesmas Temanggung yang telah melaksanakan pelayanan yang ramah anak dan terstandarisasi sebagai rujukan nasional, harapannya dapat menyampaikan praktik baiknya ke semua Puskesmas yang ada di Kabupaten Temanggung.

FOTO KEGIATAN

Apresiasi Duta Genre Tingkat Provinsi Jawa Tengah Selasa - Kamis tanggal 7 - 9 Maret 2023



Rangkaian Acara Apresiasi Duta Genre Tingkat Provinsi Jawa Tengah dilaksanakan pada hari Selasa - Kamis tanggal 7 - 9 Maret 2023 di MG Setos Hotel, Kota Semarang. Perwakilan dari Kabupaten Temanggung adalah Bayu Seta (Duta Genre Putra) dan Vionita Happy Cahyadi (Duta Genre Putri). Pada hari pertama tanggal 7 Maret 2023 setelah registrasi peserta dilaksanakan latihan koreografi, kemudian acara Pembukaan oleh Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Tengah. Setelah acara Pembukaan, Peserta Duta Genre mendapatkan materi dasar public speaking, dilanjutkan dengan tes tertulis. Hari ke-2 tanggal 8 Maret 2023 dilaksanakan penilaian lomba Praktik Penyuluhan, Wawancara, dan Minat Bakat. Hari ke-3 tanggal 9 Maret 2023 Acara Puncak Grand Final Duta Genre Tingkat Provinsi Jawa Tengah yang dihadiri oleh Kepala BKKBN, Bapak dr. Hasto Wardoyo, Sp. OG. dan Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Tengah, Bapak drg. Widwiono, M. Kes. Perwakilan Duta Genre Putri dari Kabupaten Temanggung, Vionita Happy Cahyadi berhasil meraih Juara I Duta Genre Putri Provinsi Jawa Tengah dan berhak maju ke tingkat Nasional. Duta Genre yang terpilih diharapkan dapat menjadi role model dan kepanjangan tangan dari BKKBN dalam meningkatkan pemahaman pada remaja tentang program Genre. Dengan adanya Duta Genre, sosialisasi dan promosi program di lingkungan remaja akan lebih efektif karena komunikasi yang terjalin dilakukan dengan pendekatan dari, oleh dan untuk remaja.

FOTO KEGIATAN

Rapat Koordinasi Progress Report Percepatan Penurunan Stunting Kabupaten Temanggung

Senin 2 Oktober 2023



Senin 2 Oktober 2023 bertempat di Aula Progo BAPPEDA dilaksanakan Rapat Koordinasi Progress Report Percepatan Penurunan Stunting Kabupaten Temanggung. Kegiatan ini dihadiri oleh lebih kurang 109 peserta yang terdiri dari OPD terkait, camat, kepala puskesmas, koordinator penyuluh kb dan tim teknis serta tim pakar Audit Kasus Stunting Kabupaten Temanggung. Dalam kegiatan ini dibahas mengenai hasil kegiatan bergerak bersama atasi stunting oleh Kepala DPPPakkB, lanjutan pasca program pemberian PMT 90 hari oleh Kepala Dinas Kesehatan, penganggaran PMT melalui APBDes oleh Dinpermades, dan peran TP PKK dalam program penurunan stunting oleh Pj Ketua TP PKK Kabupaten. Dalam kegiatan ini disampaikan bahwa prevalensi stunting menurut e-PPGBM turun dari 19,3% (pada bulan Mei sebelum pemberian PMT) menjadi 14,4% (pada bulan Agustus setelah 90 hari pemberian PMT). Selain itu dipaparkan juga rekomendasi dari tim pakar dalam audit kasus stunting sebagai tindak lanjut program pemberian PMT. Melalui kegiatan ini disampaikan agar penanganan stunting terus dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Temanggung beserta organisasi masyarakat dan organisasi pemuda untuk menurunkan angka prevalensi stunting Rakor dihadiri dan dibuka oleh Pj Bupati Bapak Hary Agung Prabowo dalam sambutannya beliau mengharapkan BBAS tetap dilanjutkan dg strategi seperti yg sdh dilaksanakan pada tahap 15 Mei - 12 Agustus 2023 dengan melibatkan GOW dan Darma Wanita Dinas Kesehatan setiap tgl 5 bulan berikutnya melaporkan prevalensi stunting dari hasil pengukuran yg di input dalam ePPGBM

FOTO KEGIATAN

Sinkronisasi Program dan Kegiatan Dinas PPPAPPKB

Selasa, 4 Oktober 2023



Kepala DPPPAPPKB Kabupaten Temanggung Dra. Gema Artisti Wahyudi, MM, didampingi Sekretaris Dinas serta Kabid Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada hari Selasa, 4 Oktober 2023 menerima kunjungan LKP3A (Lembaga Konsultasi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak) PC Fatayat Temanggung. Dalam pertemuan ini membahas sinkronisasi program dan kegiatan, serta membahas isu2 sekitar pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, bullying, pencegahan kekerasan dan pelecehan perempuan dan anak, KDRT, maupun percepatan penurunan stunting

FOTO KEGIATAN

Monitoring dan evaluasi Program Pembangunan Kependudukan Keluarga Berencana

(Bangga Kencana) di Kecamatan Bansari

Kamis, 5 Oktober 2023



Kepala DPPPAPKB Kabupaten Temanggung Dra. Gema Artisti Wahyudi, M.M. didampingi Kabid P3KB serta Kasubag Renkeu pada hari Kamis, 5 Oktober 2023 melaksanakan monitoring dan evaluasi Program Pembangunan Kependudukan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) di Kecamatan Bansari, diawali mengunjungi dan memonitoring kegiatan Bina Keluarga Balita (BKB) Seroja di Balai Desa Balaisari Kecamatan Bansari, dilanjutkan rapat koordinasi dan monev Bangga Kencana dengan PKB dan PPKBD Se Kecamatan Bansari di Balai Penyuluhan KB Kecamatan Bansari. Dari hasil monev di Kecamatan Bansari untuk capaian program Bangga Kencana sampai bulan Agustus, PB sudah 36.79% (142 PB) dari PPM PB 386, untuk pencapaian PA sudah 82,74% dibandingkan dengan PUS 4130. Capaian MKJP sudah 41,12% (1405) dari PA 3417, Sedangkan untuk unmetneed Kecamatan Bansari sebesar 5,88%(243) dari PUS 4130. Sedang untuk kelompok kegiatan belum merata di semua desa, dari 13 desa yang ada di Kecamatan Bansari kelompok BKB ada 6 kelompok, BKR ada 2 kelompok, BKL ada 8 kelompok, UPPKS ada 4 kelompok, PIK Remaja ada 3 kelompok dan 4 Kelompok Kampung Berkualitas.

FOTO KEGIATAN

"Jo Kawin Bocah"

Rabu, 11 Oktober 2023



Sebagai tindak lanjut Kegiatan Bergerak Bersama Atasi Stunting, pada hari ini 11 Oktober 2023 telah dilaksanakan Sosialisasi "Jo Kawin Bocah" dalam rangka pencegahan stunting di SMP Negeri 1 Pringsurat yang diikuti oleh siswa-siswi kelas 8 didampingi Kepala Sekolah Drs. Rupadi, M.Si, Wakil Kepala Sekolah dan para guru. Sebagai Narasumber pada kegiatan ini adalah Camat Pringsurat, Koordinator Penyuluh KB Kecamatan Pringsurat, Kepala Puskesmas Rejosari dan tim Kesehatan.

